

RANCANGAN
AKHIR PERUBAHAN

RENJA DSDA

2025



Jl. Braga No. 137



dissda@jabarprov.go.id



www.dinassda.jabarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Dinas SDA Tahun 2024-2026, Data Forum OPD Tahun 2025 dan Data Musrenbang di Kab/Kota, Provinsi/Nasional.

Keterkaitan antara Renja Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dengan Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat, Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota sangat erat dan merupakan satu dokumen yang tidak terpisahkan satu sama lainnya sehingga diperlukan rencana yang sinergi dalam pelaksanaan pembangunan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan keterbatasan data yang ada, kami menyadari bahwa tentunya Laporan ini masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu saran, koreksi dan masukan serta sumbangsih pemikiran dari berbagai kalangan yang peduli terhadap Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat sangat kami harapkan. Akhirnya kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat diperoleh manfaat sebagaimana mestinya.

Bandung, 03 Juli 2025

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA BARAT,



DIKKY ACHMAD SIDIK, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710813 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SUMBER DAYA AIR TAHUN 2024.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sumber Daya Air Tahun 2024-2026.....	II-1
2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	II-1
2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan	II-2
2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/ Keluaran yang Direncanakan	II-9
2.1.4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan	II-10
2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Sumber Daya Air	II-11
2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut.....	II-11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air	II-20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air ..	II-22
2.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-22
2.3.2. Tupoksi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air	II-26
2.3.3. Isu-isu Strategis dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.....	II-44
2.4. Review terhadap RKPD.....	II-54
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Usulan Masyarakat.....	II-56
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SUMBER DAYA AIR.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sumber Daya Air	III-6
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-7
BAB IV PENUTUP	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Sumber Daya Air s/d Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat	II-12
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	II-21
Tabel 2. 3 Jumlah SDM Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	II-44
Tabel 2. 4 Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kewenangan Provinsi	II-45
Tabel 2. 5 Review terhadap RKPDP Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat	II-55
Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kepentingan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat	II-57
Tabel 3. 1 Rencana Program dan Kegiatan Provinsi Strategis untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025	III-2
Tabel 3. 2 Bendungan Strategis di Provinsi Jawa Barat	III-4
Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Tahun 2025	III-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	II-25
---	-------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbentuknya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat adalah untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam mengelola Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat. Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasarannya berpedoman kepada RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005 - 2025, RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan Draft RPJMD 2025-2029.

Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat merupakan penjabaran visi, misi dan program serta kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, serta berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat.

Keterkaitan antara Renja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan Dokumen RKPDP Provinsi Jawa Barat, Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, Renja Kementrian/Lembaga dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota sangat erat dan merupakan satu dokumen yang tidak terpisahkan satu sama lainnya dan diperlukan kesinergian dalam pelaksanaan pembangunan baik di tingkat pusat, Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan;

20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
36. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.712-DSDA/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.142 DSDA/2022 Tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2027;
37. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521/Kep.550-Rek/2024 tentang RTTG DI Kewenangan Pusat dan Kewenangan Daerah Provinsi pada Wilayah Kerja Komisi Irigasi Daerah Provinsi Jawa Barat Musim Tanam 2024/2025;
38. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 374/Kep.703-DSDA/2024 tentang Rencana Alokasi Air Tahunan pada Daerah Aliran Sungai Cipalebuh di Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki Tahun 2024-2025;
39. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 374/Kep.704-DSDA/2024 tentang Rencana Alokasi Air Tahunan pada Daerah Aliran Sungai Cipalebuh di Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno Tahun 2024-2025;
40. Draft Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat memuat langkah-langkah konseptual dan komprehensif untuk memperlancar dan mempercepat pelaksanaan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan telah mempertimbangkan perubahan kondisi sosial, ekonomi politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokrasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat dan pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun susunan penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SUMBER DAYA AIR TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sumber Daya Air Tahun 2024-2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air
- 2.4 Review terhadap RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SUMBER DAYA AIR

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sumber Daya Air
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SUMBER DAYA AIR

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SUMBER DAYA AIR TAHUN 2024

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan diperlukan pengendalian dengan maksud untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap Renja, RKA, DPA, dan Renstra agar dapat diketahui sampai sejauh mana keberhasilan visi, misi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang telah dicapai.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Sumber Daya Air Tahun 2024-2026

2.1.1. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Realisasi program/kegiatan Tahun 2024 sebagian besar telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan baik pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air maupun pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi, namun terdapat beberapa Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- ❑ Target Renja 2024 : 100%
- ❑ Realisasi Capaian : 74,41%
- ❑ Faktor Penyebab : Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target dikarenakan adanya beberapa kegiatan Koordinasi ke UPTD-UPTD yang dilakukan secara bersamaan mengingat keterbatasan waktu di akhir tahun.

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pembangunan Unit Air Baku

- ❑ Target Renja 2024 : 100%
- ❑ Realisasi Capaian : 18,60%
- ❑ Faktor Penyebab : Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai target dikarenakan adanya kegiatan pembebasan lahan dan pembangunan bak penampung lumpur TPPASR Legok Nangka tidak dapat dilaksanakan akibat adanya permasalahan pembebasan tanah. Selanjutnya kegiatan ini dianggarkan kembali pada Tahun 2025 dan akan dilaksanakan secara Swakelola (Tipe 2) dengan pelaksana Swakelola dari TNI.

2.1.2. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD PSDA WS. Ciliwung - Cisadane
- 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Ciliwung - Cisadane
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PSDA WS. Ciliwung - Cisadane
- 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD PSDA WS. Ciliwung - Cisadane
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PSDA WS. Ciliwung - Cisadane
- 10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 12) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 13) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 14) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD PSDA WS. Citarum
- 15) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Citarum
- 16) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PSDA WS. Citarum
- 17) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD PSDA WS. Citarum
- 18) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PSDA WS. Citarum
- 19) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung

- 20) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung
- 21) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung
- 22) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung
- 23) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung
- 24) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD PSDA WS. Citanduy
- 25) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Citanduy
- 26) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga UPTD PSDA WS. Citanduy
- 27) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD PSDA WS. Citanduy
- 28) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PSDA WS. Citanduy
- 29) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki
- 30) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki
- 31) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki
- 32) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin UPTD PSDA WS. Ciliwung – Cisdane
- 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung
- 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 5) Pengadaan Peralatan dan Mesin UPTD PSDA WS. Citanduy
- 6) Pengadaan Peralatan dan Mesin UPTD PSDA WS. Citarum
- 7) Pengadaan Mebel UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki
- 8) Pengadaan Peralatan dan Mesin UPTD PSDA WS. Citarum

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PSDA WS. Ciliwung - Cisdane
- 5) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Ciliwung - Cisdane
- 6) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PSDA WS. Ciliwung – Cisdane
- 7) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 8) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 10) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PSDA WS. Citarum
- 11) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Citarum
- 12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PSDA WS. Citarum
- 13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung
- 14) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung
- 15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung
- 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki
- 17) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki
- 18) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki
- 19) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PSDA WS. Citanduy
- 20) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PSDA WS. Citanduy

21) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PSDA WS. Citanduy

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPTD PSDA Ciliwung - Cisdane
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD PSDA Ciliwung – Cisdane
- 6) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 8) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPTD PSDA WS. Citarum
- 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD PSDA WS. Citarum
- 10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung
- 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung
- 12) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPTD PSDA WS. Citanduy
- 13) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD PSDA WS. Citanduy
- 14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki

- 15) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD PSDA
WS. Ciwulan – Cilaki

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
- 2) Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
- 3) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
- 4) Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
- 5) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
- 6) Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
- 7) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
- 8) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
- 9) Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi UPTD PSDA Ciliwung – Cisadane
- 10) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA Ciliwung – Cisadane
- 11) Normalisasi/Restorasi Sungai UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 12) Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 13) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 14) Normalisasi/Restorasi Sungai UPTD PSDA WS. Citarum
- 15) Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi UPTD PSDA WS. Citarum

- 16) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA WS.
Citarum
- 17) Pembangunan Unit Air Baku UPTD PSDA WS. Citarum
- 18) Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi UPTD PSDA WS.
Cimanuk – Cisanggarung
- 19) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA WS.
Cimanuk – Cisanggarung
- 20) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya UPTD PSDA WS. Citanduy
- 21) Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi UPTD PSDA WS.
Citanduy
- 22) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA WS.
Citanduy
- 23) Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki
- 24) Normalisasi/Restorasi Sungai UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki
- 25) Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi UPTD PSDA WS.
Ciwulan – Cilaki
- 26) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Sungai UPTD
PSDA WS. Ciwulan – Cilaki

b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- 2) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
- 3) Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
- 4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA Ciliwung – Cisadane
- 5) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA Ciliwung – Cisadane
- 6) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 7) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno

- 8) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Citarum
- 9) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Citarum
- 10) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Citarum
- 11) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Cimanuk –
Cisanggarung
- 12) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Cimanuk
– Cisanggarung
- 13) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Citanduy
- 14) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Citanduy
- 15) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki
- 16) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Ciwulan –
Cilaki

2.1.3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari:

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA Ciliwung – Cisadane
- 2) Normalisasi/Restorasi Sungai UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 3) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 4) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA WS. Citarum
- 5) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung
- 6) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya UPTD PSDA WS. Citanduy
- 7) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA WS. Citanduy
- 8) Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki

- 9) Normalisasi/Restorasi Sungai UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki
- 10) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Sungai UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki

b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane
- 2) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane
- 3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno
- 5) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Citarum
- 6) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Citarum
- 7) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Citarum
- 8) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung
- 9) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Citanduy
- 10) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Citanduy
- 11) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki
- 12) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki

2.1.4. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yaitu permasalahan pembebasan lahan, terlambatnya proses tender dan adanya sisa anggaran akibat pengurangan volume dan penurunan spek material.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yaitu pada indikator program dan kegiatan terdapat faktor yang memberikan dukungan utama terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas

Sumber Daya Air sehingga Program/Kegiatan tersebut menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan.

2.1.5. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Sumber Daya Air

Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat maka diperlukan percepatan pembangunan dalam upaya mendukung Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat tertuang dalam target Renstra 2025-2029, yang perwujudannya antara lain melalui pelaksanaan kegiatan:

1. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi di 6 (Enam) Wilayah Sungai, yang akan mendukung target kinerja meningkatnya intensitas tanam Provinsi Jawa Barat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
2. Perencanaan Detail Situ, Embung dan Sungai di Jawa Barat dalam rangka mendukung pelaksanaan konstruksi dengan menyediakan dokumen teknis rehabilitasi situ, dan sungai serta dokumen teknis perencanaan waduk di Jawa Barat dalam rangka mendukung penyediaan air baku untuk irigasi, dan industri.
3. Pengelolaan Situ-situ di 6 (Enam) Wilayah Sungai yang meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi untuk mendukung target kinerja penyediaan air baku di Jawa Barat.
4. Perbaikan dan Pemeliharaan Sungai pada 4 (empat) Wilayah Sungai untuk mengendalikan daya rusak yang ditimbulkan oleh air.

2.1.6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut

Upaya untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran untuk kedepannya Dinas Sumber Daya Air akan meningkatkan koordinasi dengan BPKAD, BAPPEDA, Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Instansi Pusat terkait pelaksanaan pekerjaan baik yang bersumber dari APBD maupun DAK.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Sumber Daya Air s/d Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2024					
					Target Renja Dinas SDA Tahun 2023	Realisasi Renja Dinas SDA Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)				
1	Urusan Wajib													
1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1	03	01	Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (SDA)	Outcome : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A									
1	03	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas (Renja, RKA, DPA Laporan Evaluasi)	1	1	200	1	3	150			
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output : Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	1	9	6	6	100	2	15	100
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1	1	100	1	1	1	100	
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Output : Jumlah Perubahan RKA-SKPD	1	0	1	1	100	1	1	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2024	
					Target Renja Dinas SDA Tahun 2023	Realisasi Renja Dinas SDA Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1 03 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kantor Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	Output : Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Output : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	7	11	11	100	1	18	82
1 03 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	31	8	5	62,5	3	36	92
1 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Wilayah Sungai	Outcome : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	1	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	300	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Output : Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	4	0	0	0	0	0	0	0
1 03 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	0	5	5	100	1	5	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2024	
					Target Renja Dinas SDA Tahun 2023	Realisasi Renja Dinas SDA Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1 03 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Output : Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan	1	0	0	0	0	1	0	0
1 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Outcome : Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	1	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5	0	1	1	100	1	1	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2024	
					Target Renja Dinas SDA Tahun 2023	Realisasi Renja Dinas SDA Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1 03 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Tercapainya Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	50	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Outcome : Jumlah waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	15	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	0	2	2	100	1	2	100
1 03 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	4	0	1	1	100	1	1	100
1 03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Outcome : Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	0	1	1	100	1	1	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2024					
					Target Renja Dinas SDA Tahun 2023	Realisasi Renja Dinas SDA Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)				
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Output : Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12	0	1	1	100	1	1	100
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output : Jumlah Rumah Jabatan yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	2	0	1	1	100	1	1	100
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Outcome : Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	0,25	1	1	1	100	1	2	100
						Outcome : Persentase Situ yang terpelihara	10,83	3	3	3	100	1	6	100
						Outcome : Tingkat Kondisi baik jaringan irigasi	69,71	1	1	1	100	1	2	100
1	03	01	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Outcome : Jumlah Wilayah Sungai yang Dikelola dan Didukung oleh Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	6	2	1	1	100	1	3	100
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,	Output : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,	12	0	1	1	100	1	1	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2024				
					Target Renja Dinas SDA Tahun 2023	Realisasi Renja Dinas SDA Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)			
	Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun											
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Output : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	3	0	1	1	100	1	100
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Output : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang Disusun	5	0	1	1	100	1	100
1	03	02	1.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Output : Jumlah Bangunan Perkuatan tebing yang direhabilitasi	4	0	1	1	100	1	100
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Output : Jumlah Jenis Data Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi yang Dikelola	3	0	27	0	0	0	0
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Output : Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan	2	0	2	2	100	2	100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2024					
					Target Renja Dinas SDA Tahun 2023	Realisasi Renja Dinas SDA Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)				
		Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan												
1	03	02	1.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Output : Jumlah Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Dievaluasi dan Diberikan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	50	12	60	12	20	20	24	200
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	6	12	6	6	100	6	18	100
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Irigasi yang Dikelola	91	2	50	50	100	2	52	47
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Output : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	5	0	1	1	100	1	1	50

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas SDA Provinsi Jawa Barat) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d 2024					
					Target Renja Dinas SDA Tahun 2023	Realisasi Renja Dinas SDA Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1	03	02	1.01	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Output : Jumlah Jaringan Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	91	91	91	91	100	91	91	100
1	03	02	1.01	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Output : Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang dioperasikan	1	1	2	0	0	1	1	20

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air

Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Dimana jenis indikator yang dianalisis, disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2024-2026, diantaranya:

1. Persentase Situ yang terpelihara
2. Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi
3. Tingkat Kondisi baik jaringan irigasi

Hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 2.2 terlampir.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Renstra tahun ke-			Realisasi Capaian tahun ke-			Rasio Capaian tahun ke-		
			1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Persentase situ yang terpelihara	%	11,43	11,93	12,43	12,27	-	-	1,07	-	-
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi		1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	1,00	-	-
3	Tingkat Kondisi baik jaringan irigasi	poin	49,84	50,34	50,84	52,38	-	-	1,05	-	-

Keterangan:

Tahun ke – 1 : 2024

Tahun ke – 2 : 2025

Tahun ke – 3 : 2026

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air

2.3.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dalam pelaksanaan tugas Dinas SDA Provinsi Jawa Barat tentunya tidak terlepas dari wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, serta diselaraskan dalam rangka mewujudkan sinergitas dan keterpaduan secara harmonis antar wilayah, antar sektor dan antar generasi dalam pengelolaan sumber daya air. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dan Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki dengan memperhatikan pengelolaan wilayah sungai di sekitarnya dan kepentingan provinsi yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat;
- c. Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dan Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki dengan memperhatikan pengelolaan wilayah sungai di sekitarnya dan kepentingan provinsi yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat;
- d. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dan Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
- e. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air berupa pengelolaan irigasi, situ, mata air, jaringan air baku, embung, waduk dan tampungan air lainnya yang menjadi aset dan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berada pada 4 wilayah sungai kewenangan pusat yang ada di Jawa Barat;
- f. Melaksanakan koordinasi dan memberikan dukungan dalam pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Balai Besar Wilayah Sungai/BBWS, Ditjen SDA, Kementerian PUPR) pada 4 wilayah sungai kewenangan pusat yang ada di Jawa Barat yaitu

Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Wilayah Sungai Citarum, Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dan Wilayah Sungai Citanduy;

- g. Melaksanakan koordinasi dan dukungan bagi pelaksanaan kebijakan Citarum Harum;
- h. Mengatur dan menetapkan dan memberi izin atas penyediaan peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dan Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
- i. Mengatur, menetapkan dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air pada jaringan irigasi kewenangan provinsi sesuai dengan ketersediaan air yang ada dengan mengacu kepada peraturan perundangan;
- j. Membentuk dewan/forum sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi;
- k. Membentuk Tim Koordinasi
- l. Sumber Daya Air (TKPSDA) pada Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dan Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
- m. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- n. Membantu Kabupaten/Kota dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air;
- o. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- p. Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- q. Memberikan bantuan pengendalian daya rusak air kepada Daerah Kabupaten/Kota pada wilayah sungai kewenangan provinsi dan wilayah sungai kewenangan pusat.

Selanjutnya, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi tersebut dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2025 terdapat perubahan terkait hal tersebut dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peraturan ini menetapkan bahwa tugas utama Dinas Sumber Daya Air (SDA) adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi Irigasi, Sungai, Pantai, dan

Pengendalian Banjir, Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan provinsi, serta menyelenggarakan dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas utamanya tersebut, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

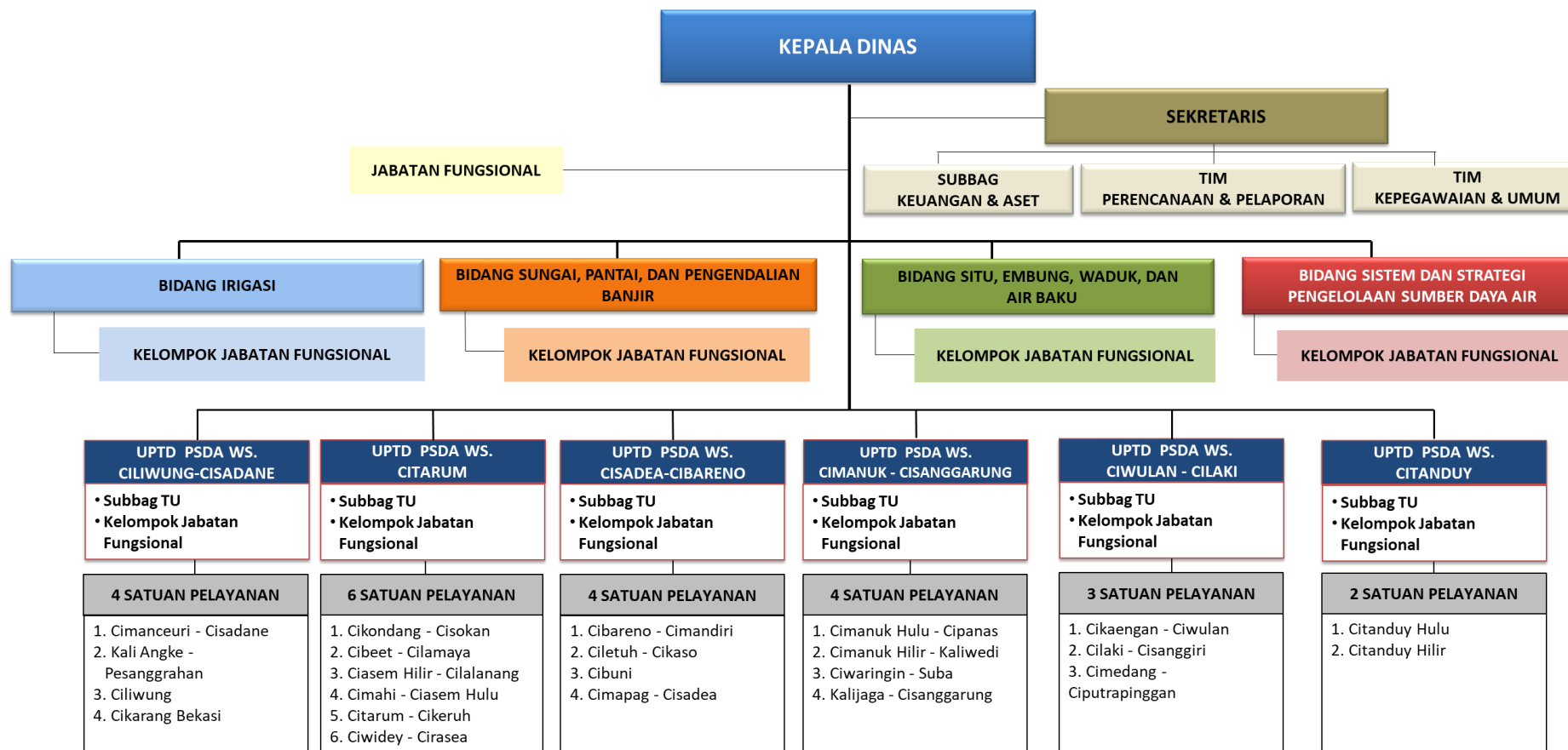
1. Perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air;
2. Penyelenggaraan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air;
3. Penyelenggaraan pengadministrasian Dinas;
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Terdapat perubahan struktur organisasi Dinas SDA Provinsi Jawa Barat tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat pasal 1, susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
3. Bidang Irigasi;
4. Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir;
5. Bidang Situ, Embung, Waduk dan Air Baku;
6. Bidang Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ditingkat pelaksana operasional dilaksanakan oleh 6 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani Pengelolaan Sumber Daya Air (UPTD PSDA) di 6 Wilayah Sungai (WS) yang ada di Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pada tingkat UPTD PSDA Wilayah Sungai terdapat Satuan Pelayanan yang berfungsi dalam mendukung operasional UPTD sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 74 Tahun 2017. Struktur organisasi Dinas SDA Provinsi Jawa Barat dan struktur organisasi UPTD PSDA Wilayah Sungai dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

2.3.2. Tupoksi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air

2.3.2.1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai **tugas pokok**: Memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan, memfasilitasi dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi Irigasi, Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir, Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta Sistem Dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi Irigasi, Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir, Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, meliputi Irigasi, Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir, Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Penyelenggaraan Evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Rincian Tugas Kepala Dinas:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Sumber Daya Air;
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air, meliputi Irigasi, Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir, Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, Serta Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintah daerah Provinsi Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, meliputi Irigasi, Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir, Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, Serta Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;

4. Menyelenggarakan pembinaan pengadministrasian Dinas;
5. Menyelenggarakan pembinaan teknis jabatan fungsional meliputi Bidang Irigasi, Bidang Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir, Bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta Bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, IKU dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen resiko, penilaian reformasi birokrasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) lingkup Dinas;
7. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP);
8. Menyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik (PIP);
9. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas Sumber Daya Air.;
10. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
11. Menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Meliputi Irigasi, Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir, Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, Serta Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
12. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Meliputi Irigasi, Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir, Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, Serta Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air; sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi
13. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air;
14. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
15. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Sumber Daya Air; dan
16. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Kesekretariatan mempunyai **tugas pokok** : menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang dan UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Bagian Kesekretariatan mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan koordinasi penghimpunan, dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan, dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
2. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan pengadministrasian keuangan dan aset kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Sekretariat:

1. Melakukan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
2. Melakukan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
3. Menyusun perencanaan dan pelaporan;
4. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pelaporan pengelolaan aset lingkup Dinas
5. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas;
6. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai lingkup Dinas;
7. Menyelenggarakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah lingkup Dinas;

8. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan umum, meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
9. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
10. Menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok Dinas;
11. Menyelenggarakan pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional;
12. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
13. Mengkaji dan menyusun bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA, dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen resiko penilaian reformasi birokrasi LHKPN serta LHKASN lingkup Dinas;
14. Menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
15. Merumuskan bahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
16. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
17. Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sumber daya air;
18. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
19. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
20. Menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
21. Melakukan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan dan Dinas;
22. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
23. Menyelenggarakan pelayanan pengadaan barang dan jasa lingkup Dinas; dan
24. Mnyelenggarakan tugas lain sesuai dengan pokok dan fungsinya.

Sekretariat, **membawahi**:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Tim Perencanaan dan Pelaporan;
3. Tim Kepegawaian.

2.3.2.3. Tugas dan Fungsi Bidang Irigasi

Bidang Irigasi mempunyai **tugas pokok**: menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air aspek Irigasi meliputi fasilitasi perencanaan teknik, pengawasan dan manajemen konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya air pada irigasi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Irigasi mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Irigasi;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis bidang Irigasi;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Irigasi; dan
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Irigasi:

1. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan di Bidang Irigasi;
2. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan pemantauan daerah irigasi secara berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan penyusunan studi kelayakan pada Bidang Irigasi;
4. Menyelenggarakan survey dan identifikasi kegiatan pengelolaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Barat;
5. Menyelenggarakan survey dan identifikasi potensi daerah irigasi baru;
6. Menyelenggarakan penyusunan desain teknis rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat;
7. Menyelenggarakan penyusunan desain teknis pembangunan jaringan irigasi baru;
8. Menyelenggarakan dukungan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis bidang irigasi;
9. Melaksanakan penyusunan dokumen lingkungan terkait pengelolaan irigasi;

10. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk irigasi;
11. Menyelenggarakan perencanaan pengadaan tanah untuk irigasi;
12. Menyelenggarakan pelaksanaan konstruksi irigasi yang bersifat khusus dan/atau kompleks;
13. Menyelenggarakan pengawasan dan manajemen konstruksi pelaksanaan konstruksi irigasi kewenangan provinsi;
14. Menyelenggarakan manajemen keselamatan konstruksi dan bangunan irigasi;
15. Menyelenggarakan manajemen risiko pengelolaan daerah irigasi;
16. Menyelenggarakan penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) irigasi;
17. Menyelenggarakan penyusunan penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI);
18. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I);
19. Menyelenggarakan fasilitasi Pengelolaan Aset Irigasi (PAI);
20. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya air pada daerah irigasi;
21. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan sempadan pada daerah irigasi;
22. Menyelenggarakan fasilitasi kajian, pencegahan, penanganan, dan pemantauan kekeringan di daerah irigasi;
23. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
24. Menyelenggarakan pelaksanaan kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) Provinsi Jawa Barat;
25. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Irigasi berupa Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), masyarakat petani pemakai air, dan lembaga irigasi lainnya;
26. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan penggunaan irigasi kepada UPTD Wilayah Sungai;

27. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan penggunaan irigasi kepada Kabupaten/Kota;
28. Menyelenggarakan program dan rencana kegiatan daerah irigasi dan infrastruktur irigasi untuk pemanfaatan lainnya (non pertanian);
29. Menyelenggarakan desain teknis irigasi untuk pemanfaatan lainnya (non pertanian);
30. Menyelenggarakan dukungan teknis usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah, dan Dana Lainnya untuk bidang irigasi;
31. Menyelenggarakan dukungan teknis untuk bantuan keuangan ke pemerintah Kabupaten/Kota untuk bidang irigasi;
32. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sumber daya air terkait pengelolaan daerah irigasi;
33. Menyelenggarakan kerjasama pengelolaan dan pengembangan daerah irigasi;
34. Menyelenggarakan penetapan sempadan daerah irigasi;
35. Menyelenggarakan penyediaan data irigasi
36. Menyelenggarakan kajian penerapan dan pengembangan teknologi irigasi
37. Menyelenggarakan kajian manfaat ekonomi terkait pengelolaan daerah irigasi;
38. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
39. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang irigasi;
40. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - 1) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Irigasi;
 - 2) Menyelenggarakan tindak Pemeriksaan lingkup Bidang;
 - 3) Menyelenggarakan telaahan lanjut staf pertimbangan pengambilan kebijakan; Laporan sebagai Hasil bahan
 - 4) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Irigasi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 5) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Irigasi; dan
 - 6) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.3.2.4. Tugas dan Fungsi Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir

Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir mempunyai **tugas pokok** : menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan

umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air aspek Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir meliputi fasilitasi perencanaan teknik, pengawasan dan manajemen konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya air pada Sungai dan Pantai.;

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Bina Konstruksi mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir;
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir:

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang di Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir;
2. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang di Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir;
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir;
4. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan perlindungan dan konservasi Sungai, Pantai dan pengendalian kawasan banjir;
5. Menyelenggarakan penyusunan rencana induk (masterplan) pengendalian banjir;
6. Menyelenggarakan penyusunan rencana induk (masterplan) drainase utama kewenangan Provinsi Jawa Barat;
7. Menyelenggarakan dukungan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis bidang sungai, pantai, drainase utama dan infrastruktur pengendalian banjir;
8. Menyelenggarakan penyusunan studi kelayakan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
9. Menyelenggarakan survey dan identifikasi kegiatan pengelolaan sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir;

10. Menyelenggarakan identifikasi orde sungai dan drainase utama; Menyelenggarakan penyusunan desain teknis penanganan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
11. Melaksanakan penyusunan dokumen Lingkungan terkait sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
12. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk infrastruktur sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
13. Menyelenggarakan dukungan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir;
14. Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi infrastruktur sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir yang bersifat khusus dan/atau kompleks;
15. Menyelenggarakan pengawasan dan manajemen konstruksi pelaksanaan konstruksi infrastruktur sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir pada UPTD Wilayah Sungai;
16. Menyelenggarakan manajemen keselamatan konstruksi dan bangunan infrastruktur sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
17. Menyelenggarakan manajemen risiko pengelolaan infrastruktur sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
18. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan pembangunan Infrastruktur strategis untuk pembangunan infrastruktur sungai, pantai, dan pengendalian banjir kepada Pemerintah Pusat;
19. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan pembangunan Infrastruktur strategis untuk pembangunan infrastruktur sungai, pantai, dan pengendalian banjir kepada Pemerintah Pusat;
20. Menyelenggarakan fasilitasi kajian, pencegahan, penanganan, dan pemantauan kekeringan hidrologi;
21. Menyelenggarakan penetapan neraca dan alokasi air pada wilayah sungai kewenangan Provinsi;
22. Melaksanakan evaluasi kegiatan hidrologi dan pemantauan DAS pada wilayah sungai kewenangan provinsi;
23. Menyelenggarakan evaluasi pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi (SIH3);

24. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan infrastruktur sumber daya air pada sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir kepada UPTD Wilayah Sungai;
25. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan infrastruktur sumber daya air pada sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir kepada Kabupaten/Kota;
26. Menyelenggarakan pembinaan pemantauan penggunaan air pada sungai;
27. Menyelenggarakan dukungan teknis usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah, dan dana lainnya untuk penanganan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
28. Menyelenggarakan dukungan teknis untuk bantuan keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
29. Menyelenggarakan penetapan dan pengelolaan sempadan sungai dan kawasan resapan air;
30. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sumber daya air dan sempadan pada sungai, pantai, dan kawasan banjir;
31. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya air di sungai;
32. Melaksanakan pengawasan kawasan resapan air;
33. Menyelenggarakan penyusunan rencana ruang dan kawasan lindung pada sumber air;
34. Menyelenggarakan fasilitasi kajian kawasan konservasi sungai;
35. Melaksanakan fasilitasi kajian lingkungan sumber daya air;
36. Menyelenggarakan fasilitasi kajian adaptasi perubahan iklim dalam pengelolaan sumber daya air;
37. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan dalam pemantauan ruang dan kawasan lindung sumber air pada Daerah Aliran Sungai
38. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan pengendalian dan pemantauan kualitas air pada sungai;

39. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sumber daya air terkait pengelolaan sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir;
40. Menyelenggarakan kerjasama pengelolaan dan pengembangan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir di Provinsi Jawa Barat;
41. Menyelenggarakan kajian manfaat ekonomi terkait penanganan sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir di Provinsi Jawa Barat;
42. Menyelenggarakan penyediaan data sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir
43. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
44. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir
45. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi :
 - 1) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir;
 - 2) Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
 - 3) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - 4) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 5) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir; dan
 - 6) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2.5. Tugas dan Fungsi Bidang Situ, Embung, Waduk dan Air Baku

Bidang Bina Situ, Embung, Waduk dan Air Baku mempunyai **tugas pokok**: menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air aspek Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku meliputi fasilitasi perencanaan teknik, pengawasan dan manajemen konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta pengendalian dan pengawasan penggunaan sumber daya air pada Situ, Embung, dan Waduk.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Situ, Embung, Waduk dan Air Baku mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku;
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Situ, Embung, Waduk dan Air Baku:

1. Menyelenggarakan penyusunan program kerja dan kegiatan terkait situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang situ, embung, waduk dan air baku;
3. Menyelenggarakan program dan rencana kegiatan pemanfaatan multifungsi untuk situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
4. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan perlindungan situ, waduk, mata air dan sumber air baku lainnya;
5. Menyelenggarakan penyusunan dokumen acuan (masterplan) pemenuhan air baku untuk Provinsi Jawa Barat berbasiskan wilayah sungai dan administrasi Kab/Kota;
6. Menyelenggarakan dukungan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis terkait situ, embung, waduk, mata air dan sumber air lainnya serta penyediaan air baku;
7. Menyelenggarakan penyusunan studi kelayakan terkait situ, embung, waduk dan sistem penyediaan air baku serta sumber air lainnya;
8. Menyelenggarakan survey dan identifikasi kegiatan situ, embung, waduk dan penyediaan air baku serta sumber air lainnya;
9. Menyelenggarakan penyusunan desain teknis situ, embung, waduk dan sistem penyediaan air baku serta sumber air lainnya;
10. Melaksanakan penyusunan dokumen Lingkungan terkait situ, embung, waduk, mata air, dan air baku serta sumber air lainnya;

11. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk infrastruktur dan penambahan areal situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
12. Menyelenggarakan perencanaan pengadaan tanah untuk konstruksi dan penambahan areal situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
13. Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya yang bersifat khusus dan/atau kompleks;
14. Menyelenggarakan pengawasan dan manajemen konstruksi pelaksanaan konstruksi situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya di UPTD Wilayah Sungai
15. Menyelenggarakan manajemen keselamatan bangunan air di situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
16. Menyelenggarakan manajemen risiko pengelolaan situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
17. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan air baku untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
18. Menyelenggarakan penetapan dan pengelolaan sempadan situ, waduk, mata air dan sumber air baku lainnya;
19. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya air pada situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
20. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pengendalian pemanfaatan ruang sumber daya air dan sempadan pada situ, embung, waduk, mata air, dan tampungan air lainnya;
21. Menyelenggarakan dukungan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya air pada situ, embung, waduk, mata air dan sumber air lainnya serta penyediaan air baku di Provinsi Jawa Barat;
22. Menyelenggarakan pemantauan pola operasi, pemanfaatan / penggunaan dan Rencana Tindak Darurat (RTD) waduk eksiting serta pemantauan waduk strategis;
23. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan penggunaan situ, embung, waduk, mata air dan sumber air lainnya serta penyediaan air baku kepada UPTD Wilayah Sungai;

24. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan penggunaan situ, embung, waduk, mata air dan sumber air lainnya serta penyediaan air baku kepada Kabupaten/Kota;
25. Menyelenggarakan dukungan teknis usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana hibah, dan dana lainnya untuk situ, embung, waduk, mata air dan sumber air lainnya serta penyediaan air baku;
26. Menyelenggarakan dukungan teknis untuk bantuan keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan situ, embung, waduk, mata air dan sumber air lainnya serta penyediaan air baku
27. Menyelenggarakan fasilitasi kajian, pencegahan, penanganan, dan pemantauan kekeringan air baku bagi kebutuhan dasar masyarakat
28. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan pengendalian kualitas air pada situ, waduk, mata air, dan sumber air baku lainnya;
29. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pengelola air tanah untuk mendorong keterpaduan penggunaan air permukaan dan air tanah.
30. Menyelenggarakan penyediaan data situ, embung, waduk, mata air dan sumber air lainnya serta penyediaan air baku;
31. Menyelenggarakan kerjasama pengelolaan dan pengembangan situ, embung, waduk, mata air dan sumber air lainnya serta penyediaan air baku di Provinsi Jawa Barat;
32. Menyelenggarakan kajian manfaat ekonomi terkait penanganan situ, embung, waduk, mata air dan sumber air lainnya serta penyediaan air baku di Provinsi Jawa Barat;
33. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sumber daya air terkait pengelolaan situ, embung, waduk, mata air dan sumber air lainnya serta penyediaan air baku;
34. Melaksanakan fasilitasi kajian sanitasi dan kesehatan masyarakat pengguna air;
35. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
36. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
37. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi :
 - 1) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku;
 - 2) Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;

- 3) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 4) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 5) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku; dan
- 6) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2.6. Tugas dan Fungsi Bidang Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Bina Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai **tugas pokok**: menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air aspek Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kebijakan pengelolaan sumber daya air, penatagunaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air, kerjasama sumber daya air, kelembagaan sumber daya air, dan sistem informasi sumber daya air.

Bidang Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis bidang Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air:

1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Menyelenggarakan penyusunan bahan dan rancangan peraturan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Barat;

4. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan provinsi (JakProv) terkait pengelolaan sumber daya air
5. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan dokumen Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Jawa Barat;
6. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Jawa Barat
7. Menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan monitoring rencana pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Jawa Barat;
8. Menyelenggarakan fasilitasi wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air untuk Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat;
9. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat;
10. Menyelenggarakan fasilitasi rekomendasi teknis perijinan penggunaan sumber daya air dan pemanfaatan ruang sumber daya air untuk wilayah sungai kewenangan provinsi;
11. Menyelenggarakan penyusunan Rekapitulasi Laporan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) pada 7 (tujuh) wilayah sungai berdasarkan laporan dari UPTD PSDA Provinsi Jawa Barat;
12. Menyelenggarakan fasilitasi usulan tata cara perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) dan Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) sebagai dasar perhitungan Pajak Air Permukaan
13. Menyelenggarakan penyusunan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
14. Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
15. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian perizinan perusahaan sumber daya air yang telah terbit pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
16. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian persetujuan penggunaan sumber daya air yang telah terbit pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
17. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada wilayah sungai kewenangan provinsi;
18. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;

19. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan lembaga pengelola sumber daya air, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air;
20. Melaksanakan pemantauan dan sinergitas keterlibatan badan usaha dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
21. Melaksanakan penyusunan perumusan program kerjasama antar daerah di bidang sumber daya air;
22. Menyelenggarakan kerjasama pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi (*Integrated Water Resources Management*)
23. Menyelenggarakan kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
24. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan skema investasi pengelolaan sumber daya air;
25. Melakukan penyusunan dan perhitungan Indeks Ketahanan Air (IKtA) wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat meliputi dimensi konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air, pendayagunaan sumber daya air, peran serta masyarakat, SISDA;
26. Melakukan perhitungan Indeks Ketahanan Air (IKtA) Wilayah Sungai (WS) kewenangan Provinsi Jawa Barat;
27. Melakukan monitoring dan evaluasi Indeks Ketahanan Air (IKtA) Wilayah Sungai kewenangan Provinsi Jawa Barat;
28. Melaksanakan evaluasi kegiatan sistem informasi sumber daya air (SISDA) Provinsi Jawa Barat;
29. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pada kegiatan perizinan sumber daya air, pengendalian dan penggunaan sumber daya air, kerjasama sumber daya air, kelembagaan sumber daya air, pemberdayaan masyarakat kepada UPTD PSDA Wilayah Sungai;
30. Menyelenggarakan pembinaan pada kegiatan perizinan sumber daya air, pengendalian dan penggunaan sumber daya air, kerjasama sumber daya air, pemberdayaan masyarakat kepada Kabupaten/Kota;
31. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
32. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
33. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

- 1) Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 2) Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- 3) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 4) Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 5) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- 6) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2.7. Tugas dan Fungsi UPTD

Tugas pokok UPTD PSDA Wilayah Sungai di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas meliputi pelayanan, pengembangan, pelatihan, konservasi dan pelestarian dibidangnya, sesuai dengan kebijakan gubernur serta fungsi Dinas di bidang sumber daya air di wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPTD mempunyai **fungsi**:

1. Pelaksanaan operasional pelayanan di bidang sumber daya air yang meliputi pelaksanaan operasi dan pengelolaan data sumber daya air, pemeliharaan serta perbaikan prasarana sumber daya air, pengendalian dan pengamanan pemanfaatan air dan sumber air.
2. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian, pelaksanaan operasional pelayanan di bidang sumber daya air yang meliputi pelaksanaan operasi dan pengelolaan data sumber daya air, pemeliharaan serta perbaikan prasarana sumber daya air, pengendalian dan pengamanan pemanfaatan air dan sumber air
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum, keuangan, pengelolaan asset dan perlengkapan.

Tugas pokok Jabatan Fungsional adalah membantu melaksanakan tugas yang bersifat fungsional untuk optimalisasi tugas dan fungsi Dinas SDA. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Jabatan Fungsional mempunyai **fungsi** :

1. Pelaksanaan optimalisasi fungsi kesekretariatan
2. Pelaksanaan optimalisasi fungsi

2.3.3. Isu-isu Strategis dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tentunya memerlukan langkah-langkah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air melalui tahapan-tahapan yang dirumuskan dalam beberapa kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan serta dukungan luar yang secara signifikan dapat mempengaruhi. Potensi sumber daya air sebagaimana tersebut di atas, tentunya harus dikelola melalui suatu sarana yang memadai baik dari segi pengaturan, institusi dengan SDM-nya maupun dukungan biaya. Beberapa kekuatan pendorong dan penghambat dari dalam maupun pengaruh luar yang terjadi di Jawa Barat pada saat ini secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

2.3.3.1 Analisis Lingkungan Internal

A. Kekuatan :

1. Tersedianya SDM yang Memiliki Komitmen yang Tinggi

Sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan faktor utama sebagai unsur manajemen yang akan menentukan keberhasilan suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yang diharapkan. Ketersediaan SDM yang memiliki komitmen tinggi bukan hanya ditinjau dari aspek kuantitasnya saja, tapi juga perlu ditinjau dari aspek kualitasnya. Dari sejumlah 1.046 SDM yang ada saat ini, diklasifikasikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Jumlah SDM Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

No.	Unit Kerja	ASN			Non ASN
		Teknik	Non Teknik	Jumlah	
1	Dinas SDA	36	83	119	55
2	UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane	23	15	38	104
3	UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	15	12	27	144
4	UPTD PSDA WS. Citarum	19	13	32	276
5	UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung	27	21	48	256
6	UPTD PSDA WS. Citanduy	22	15	37	87
7	UPTD PSDA WS. Ciwulan-Cilaki	22	16	38	124
Jumlah		164	175	339	1.046

2. Adanya Lembaga Koordinasi

Sejalan dengan misi politik pemerintahan yaitu demokrasi dan stabilitas, demokrasi harus bersifat aspiratif dan akuntabel. Aspiratif berarti dalam proses penyusunan kebijaksanaan untuk rekrutmen, regulasi, program, dan anggaran harus berasal dari dan atau bersama semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan manajemen, dan akuntabel berarti setiap kebijaksanaan dan tindakan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu suatu forum yang mempunyai fungsi koordinasi dalam berbagai masalah pengelolaan sumberdaya air, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat DPS. Forum tersebut terdiri dari berbagai unsur yang dapat mewakili unsur pengguna, unsur pengawas dan pengendali, unsur lembaga ilmiah, unsur birokrasi dan unsur stakeholder lainnya. Forum ini harus bersifat *independent*, tetapi tidak mencampuri dan melampaui kewenangan masing-masing instansi terkait. Dalam pengelolaan sumber daya air saat ini, fungsi koordinasi telah dilaksanakan melalui lembaga PTPA/DSDA (Panitia Tata Pengaturan Air/ Dewan Sumber Daya Air) di tingkat provinsi dan PPTPA/TKPSDA (Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air) di tingkat Wilayah Sungai.

3. Memiliki Kewenangan Pengelolaan SDA

Mengacu terhadap UU. No 17/20019 tentang Sumber Daya Air, PP No. 20/2006 tentang Irigasi, PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan, PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Permen PU No.11A/PRT/2006 tentang Kriteria dan Pembagian Wilayah Sungai kewenangan provinsi Jawa Barat di bidang Sumber Daya Air, serta Kepres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai, secara garis besar dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Kewenangan Provinsi

No	Wilayah Sungai	Daerah Irigasi (bh/ha)	Situ, Embung, Waduk (bh/ha)	Sungai (bh/km)	Pantai (km)
1	Ciliwung-Cisadane	10/5.096	156/808,02	288/9.444,51	181
2	Cisadea-Cibareno	12/12.727	187/202,46	521/1.6981,84	168
3	Citarum	34/26.044	149/2.352,23	620/11.864,47	-
4	Cimanuk-Cisanggarung	27/19.991	281/1.352,23	343/11.179,99	187
5	Ciwulan-Cilaki	6/5.805	61/285,62	289/9.419,87	120
6	Citanduy	10/4.985	59/426,31	204/6.649,32	68
Total		99/7.4648	893/5.426,87	2.265/65.540	724

Untuk kewenangan tertentu lainnya, selain bidang ke-PU an, juga ada pada bidang-bidang lainnya seperti:

Bidang Pertanian meliputi:

- ❑ Koordinasi dalam rencana alokasi air untuk irigasi
- ❑ Koordinasi dalam penyusunan bahan rekomendasi pemanfaatan sumber air untuk perikanan.

Bidang Pertambangan dan Energi meliputi:

- ❑ Koordinasi dalam penyusunan potensi sumberdaya air tanah
- ❑ Penyusunan rekomendasi perijinan usaha galian golongan C dari sumber air
- ❑ Penyusunan manual/tata cara penambangan galian golongan C pada sumber air.

Bidang Kehutanan dan Perkebunan meliputi:

- ❑ Menyusun peta dan Data DPS untuk setiap sumber air.
- ❑ Menyusun data kondisi debit sungai dan sumber air lainnya.

Bidang Penataan Ruang meliputi:

- ❑ Menyusun data potensi dan pemanfaatan air dan sumber air.
- ❑ Mengendalikan (perijinan) pemanfaatan air dan sumber air.

Bidang Perhubungan meliputi:

- ❑ Koordinasi perencanaan dan pembangunan pelabuhan pada sumber air.
- ❑ Lalu lintas air.

Bidang Lingkungan Hidup meliputi:

- ❑ Penyusunan bahan penetapan serta pengawasan dan pengendalian kawasan garis sempadan sungai dan sumber air lainnya.
- ❑ Penyusunan bahan penetapan serta pengawasan baku mutu dan peruntukan sungai dan sumber air lainnya.
- ❑ Koordinasi dalam penilaian amdal sumberdaya air.
- ❑ Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah cair ke sumber air

4. Tersedianya Hasil Studi dan Desain Teknis Pengembangan SDA

Hasil-hasil studi dan desain teknik baik yang berbentuk Master Plan maupun studi proyek-proyek tertentu secara parsial, dapat digunakan paling tidak sebagai acuan dalam mereview kembali sehubungan dengan adanya perubahan situasi dan kondisi

fisik lapangan ataupun adanya perubahan kebijaksanaan pemerintah. Beberapa pola pengembangan hasil studi yang telah ada diantaranya adalah Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea – Cibareno dan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan – Cilaki, menjadi acuan atau pedoman atau kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air selama 20 tahun mendatang.

B. Kelemahan:

1. Kondisi Infrastruktur Belum Memadai

Kondisi infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan sumber daya air sangat diperlukan terutama untuk mendukung pelayanan yang efektif dan efisien terhadap masyarakat. Dalam kurun waktu 2 - 3 dekade terakhir, pembangunan infrastruktur bidang sumber daya air di Jawa Barat lebih banyak difokuskan dalam pembangunan jaringan irigasi untuk menunjang peningkatan produksi pertanian.

Kurang lebih 1.090.120 (8.982 DI) Ha sawah di Jawa Barat telah mendapat pelayanan irigasi, mulai irigasi sederhana sampai irigasi teknis. Dari total areal sawah tersebut diantaranya ada sekitar 100.600 Ha (103 DI) atau hanya 10,05% merupakan kewenangan provinsi Jawa Barat dengan kondisi jaringan irigasi pada akhir tahun 2024 sebesar 57,04% dan target capaian tahun 2025 sebesar 58,53.

Prasarana lainnya yang belum memadai diantaranya adalah situ-situ yang lokasinya tersebar di Jawa Barat, sebanyak 814 Situ yang teridentifikasi pada Tahun 2021. Untuk mengetahui Situ/Embung/Waduk yang mengalami alih fungsi lahan diperlukan kajian khusus terkait hal tersebut. Hal lain prasarana pengendali banjir, air baku juga pada umumnya belum memadai dilihat baik aspek kuantitasnya maupun kualitasnya.

2. Belum Adanya Sistem *Database* yang Lengkap dan Akurat

Air merupakan sumber daya yang mengalir (*flowing resource*) yang tidak mengenal batas administrasi ataupun batas instansi. Keberadaannya sangat diperlukan dalam kehidupan dan sangat tergantung dari sistem siklus alaminya. Satu unsur dalam siklusnya terganggu, maka seluruh sistem siklus lainnya akan terganggu. Kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, ataupun operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air perlu ditunjang oleh data yang lengkap dan akurat. Dengan tersedianya sistem komputerisasi, maka penyusunan data dan informasi akan lebih komunikatif apabila disusun dalam sistem *database*.

3. Kurangnya Tenaga Profesional Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu instrumen yang penting dalam sistem kontrol. Penggunaan air yang tidak terkontrol akan mengakibatkan konflik dan akan mengganggu kesinambungan ketersediaan air dimasa mendatang. Kasus-kasus pencurian air, pencemaran, *conflict of interest*, rusaknya sempadan sungai, hilangnya situ, dan turunnya muka air tanah, adalah merupakan contoh-contoh dari kurangnya tenaga profesional dibidang wasdal.

4. Kurangnya Sosialisasi Bidang Pengelolaan SDA

Penggunaan air yang boros, pencemaran, penggunaan air tanpa ijin, penggalian pasir yang seporadis, perusakan sumber air atau bangunan-bangunan air, sering terjadi bukan karena semata-mata kurang koordinasi atau kurangnya pengawasan, tapi juga akibat masyarakat kurang mengerti. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui suatu peraturan yang dikeluarkan pemerintah, apalagi mengaplikasikannya. Masyarakat kurang punya rasa memiliki terhadap sarana dan prasarana SDA yang ada saat ini. Hal ini pada dasarnya adalah akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah/pengelola.

2.3.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

A. Peluang:

1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Adanya Peraturan dan perundangan yang mengatur sistem pengelolaan sumber daya air baik yang dikeluarkan pemerintah pusat ataupun pemerintah propinsi, adalah merupakan peluang bagi Dinas SDA untuk digunakan sebagai acuan dalam mencapai visi dan misi yang diinginkan. Beberapa peraturan dan perundangan yang telah ada saat ini diantaranya adalah :

- ❑ Undang-undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- ❑ Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
- ❑ Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- ❑ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
- ❑ Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- ❑ Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air
- ❑ Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11A/PRT/2006 tentang Kriteria dan Pembagian Wilayah Sungai
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 37/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 38/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 39/PRT/M/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 2/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 9/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi
- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi

- ❑ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan
- ❑ Peraturan Daerah No. 3 tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat
- ❑ Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air
- ❑ Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- ❑ Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pola Pengadaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno
- ❑ Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pola Pengadaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki
- ❑ Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki
- ❑ Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno

2. Adanya Perguruan Tinggi Bidang Sumber Daya Air

Peluang lainnya di Jawa Barat yang dapat dimanfaatkan baik untuk meningkatkan profesionalisme pegawai ataupun untuk meningkatkan ilmu dan teknologi, adalah adanya lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga pelatihan seperti ITB, IPB, UNPAD, UNPAR, PUSBIKTEK PU, PUSLITBANG SDA dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut disamping transfer ilmu dan teknologi SDA, memproduksi tenaga kerja yang handal, juga bisa dijadikan mitra kerja.

3. Potensi Sumber Daya Air yang Cukup Tinggi

Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak $5^{\circ} 50' - 7^{\circ} 50'$ LS dan $104^{\circ} 48' - 104^{\circ} 48'$ BT. Secara administratif, wilayah tersebut terdiri dari 18 Kabupaten, 9 Kota, 558 Kecamatan, 5.231 Desa dan 547 kelurahan yang mempunyai luas wilayah mencapai 39.629 Km² dengan luas wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai. Ditinjau dari aspek ketinggian di atas permukaan laut, daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam dibagian selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai di bagian tengah dengan ketinggian 100 – 1.500 m dpl, serta wilayah daratan luas di bagian utara dengan ketinggian 0 – 10 m dpl. Ditinjau berdasarkan iklim dan curah hujan Provinsi Jawa

Barat beriklim tropis, dengan suhu paling rendah 9^o C di Puncak Gunung Pangrango dan suhu paling tinggi 34^o C di Pantai Utara, Dengan curah hujan rata-rata antara 2000 mm per tahun, namun di beberapa pegunungan berkisar antara 3.000 – 5.000 mm per tahun, secara hidrologis wilayah Jawa Barat di aliri oleh 3.277 ruas sungai induk dan anak – anak sungai yang terakumulasi ke dalam 40 DAS utama (2.046 sungai). Potensi ini jelas merupakan sumber daya yang komparatif dibanding propinsi lain, sehingga merupakan peluang bagi Dinas untuk mengembangkannya agar menjadi sumber daya yang kompetitif.

a. Air Memiliki Nilai Ekonomi yang Tinggi

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan sumber daya air akan memerlukan investasi yang cukup besar. Hal ini sangat berat apabila sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah. Oleh karena itu perlu peran aktif masyarakat dan terutama masyarakat pengusaha. Dengan adanya konsep bahwa air mempunyai nilai ekonomi disamping fungsi sosial, maka peluang untuk melibatkan sektor usaha dalam pengelolaan sumber daya air menjadi terbuka. Bahwa masih ada kalangan yang pro dan kontra akan konsep tersebut, adalah hal yang wajar mengingat air adalah merupakan pemberian Tuhan yang merupakan monopoli alam (natural monopoly) yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pelayanan yang diterima dan dinikmati konsumen mewajibkan adanya upaya imbalan. Bentuk imbalan tersebut berupa kewajiban konsumen membayar tarif air atas setiap pelayanan yang dinikmati. Konsumen akan memiliki rasa wajib membayar bilamana ada jaminan bahwa kebutuhannya dapat dipenuhi dimana pada tahun 2006 dengan SIPPA 520 buah diperoleh Nilai Perolehan Air (NPA) sebesar Rp 466.904.000.000,00. Pelayanan yang berhasil dapat dinikmati konsumen merupakan wujud nyata dari azas manfaat. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah produk bersama antara pelayanan dari sistim prasarana air baku dan pelayanan dari sistem prasarana distribusi air secara bersama-sama.

b. Kebutuhan Air dari Tahun Ketahun Cenderung Meningkat

Jumlah penduduk Jawa Barat yang terus meningkat dimana pada tahun 2008 sebanyak 41,84 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2025 sebanyak 52, 70 juta jiwa, kegiatan ekonomi dan pembangunan yang terus berkembang, dan

standar kehidupan masyarakat yang terus meningkat, mendorong kebutuhan air yang terus meningkat. Sumber air selayaknya dikembangkan dengan berorientasi pada kebutuhan air untuk dimanfaatkan. Bagaimanapun besarnya potensi sumber air yang dikandung pada suatu wilayah hanya bisa dikembangkan bilamana ada yang membutuhkan air. Kebutuhan air dimaksud dapat terbagi dalam dua kelompok, masing-masing yaitu berupa tambahan atas kebutuhan saat ini, dan kebutuhan masa mendatang. Dengan demikian maka demand yang cenderung meningkat dapat dijadikan sebagai peluang untuk upaya pengelolaan SDA yang efektif efisien dimasa mendatang.

B. Ancaman:

1. Peran serta/Kesadaran Masyarakat Pengelolaan SDA Kurang

Bukti terbaru dari beberapa sumber (seperti *'Water Efficiency Teams'* dari USAID dan *'Urban Water Supply Sector Policy Framework'* dari Bank Dunia) menunjukkan bahwa keberhasilan pembaharuan sektor sumber daya air akan tergantung pada aliran dana untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan air. Pembaharuan harus mengarah pada transaksi penjualan dan penerimaan, dan harus meningkatkan pelayanan dan menghasilkan pendapatan yang mencukupi atas pelayanan yang diberikan. Dari rancangan struktur kelembagaan sebagaimana diatur dengan Perda No. 3/2001, pada dasarnya ada tiga pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, masyarakat pemakai air dan mitra swasta, yang akan mempunyai peran tidak bisa dipisahkan dan saling mengisi. Dengan demikian, maka peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan SDA menjadi sangat penting. Upaya pemberdayaan peran masyarakat pemakai air dan mitra swasta perlu mendapat prioritas. Tidak adanya peran serta masyarakat merupakan ancaman bagi keberhasilan pengelolaan SDA.

2. Terjadi Konflik Kepentingan Antar Sektor dan Wilayah

Pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan disatu pihak terus meningkat dari tahun ketahun, sebagai dampak pertumbuhan penduduk dan pengembangan aktivitasnya. Padahal dilain pihak ketersediaan sumberdaya air semakin terbatas malahan cenderung semakin langka, terutama akibat penurunan

kualitas lingkungan dan penurunan kualitas akibat pencemaran. Hal ini pada saatnya dapat menimbulkan ketegangan dan malahan konflik akibat terjadinya benturan kepentingan manakala permintaan (*demand*) tidak lagi seimbang dengan ketersediaan sumberdaya air untuk pemenuhannya (*supply*). Hampir setiap tahun pada musim kering, terjadi benturan kepentingan antara pemakai air, terutama antara masyarakat pemakai air untuk pertanian dengan masyarakat industri. Disatu pihak masyarakat petani yang sudah terlebih dulu menggunakan air untuk pertanian, manakala terjadi persaingan, senantiasa berada pada sisi yang lemah dan merupakan pihak yang tersisih. Sementara dipihak lain masyarakat industri, yang lebih banyak menjanjikan bernilai ekonomi, senantiasa berada dipihak yang kuat. Hal ini apabila tidak dapat diatasi akan menjadi ancaman bagi keberhasilan pengelolaan SDA dimasa mendatang.

3. Tingkat Pencemaran Air Cukup Tinggi

Suatu pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Air diharapkan berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Atas dasar itu, hal-hal yang berkaitan dengan keduanya harus merupakan bagian dari pembangunan dan pengelolaan itu sendiri. Hal-hal yang dimaksud meliputi:

- Pengendalian kualitas air
- Pengamanan fungsi konservasi sumber air
- Pemeliharaan fungsi alur sungai dan pemeliharaan fungsi muara sungai
- Kesehatan lingkungan pemukiman penduduk.

Aktivitas ekonomi yang menimbulkan pencemaran terhadap sumber air dan lingkungan hidup tanpa terkendali akan menjadi ancaman bagi kesinambungan sumber daya air dan kesinambungan pembangunan dimasa mendatang.

4. Kondisi Daerah Tangkapan Kurang Mendukung

Sumber air dapat terus memproduksi air secara berkesinambungan bilamana secara terus menerus terdapat upaya-upaya konservasi sumber air. Rusaknya daerah tangkapan air dan penjarahan hutan akan mengancam keberlanjutan ketersediaan air dimasa mendatang. Pembangunan harus tetap menyisakan lingkungan hidup yang dapat memberikan kehidupan kepada generasi mendatang. Kemampuan daya

dukung lingkungan harus menjadi fokus perhatian sebagai faktor pembatas dalam pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan semua pelaku pembangunan.

2.4. Review terhadap RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari skema Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Kebijakan pembangunan Jawa Barat pada tahun 2024 lebih menekankan pada kemandirian Masyarakat Jawa Barat melalui peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, produktivitas untuk peningkatan sumber daya manusia Jawa Barat; pengembangan kemampuan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Barat; peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah; pengendalian keseimbangan daya dukung lingkungan dan peningkatan mitigasi bencana serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang dapat dilihat pada Tabel 2.5. Dengan perbandingan tersebut terlihat bahwa beberapa kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini merupakan usulan kegiatan baru dimana kegiatan-kegiatan tersebut diusulkan untuk mendukung pembangunan beberapa waduk atau bendung yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang akan berdampak juga bagi Masyarakat Provinsi Jawa Barat, seperti Dukungan Pembangunan Waduk Cibeet dan Cijurey di Kab. Bogor. Selain Dinas Sumber Daya Air tengah mengupayakan pembangunan Daerah Irigasi Baru Caringin Tahap 2 di Kab. Sukabumi. Selain DI. Caringin, masih ada juga rencana pembangunan DI. Curug Dendeng Kab. Cianjur, DI. Cikalong Kab. Tasikmalaya, DI. Parigi Kab. Pangandaran, DI. Candra Goyang Kab. Garut, dan Potensi Daerah Irigasi baru lainnya yang saat ini masih dalam proses perencanaan.

Tabel 2. 5 Review terhadap RKPd Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat

Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)	Satuan	Target Akhir RPD 2024-2026	Realisasi 2023	2024		Tingkat Capaian Kinerja (%)	Predikat	
				Target	Realisasi			
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase Situ yang Terpelihara	%	11,43	11,55	11,43	11,67	102,10	Sangat Tinggi
2	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	-	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi
3	Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	poin	49,84	50,92	49,84	52,38	105,10	Sangat Tinggi

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, terdapat hal-hal yang mendorong dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga mampu mencapai kinerja dengan baik dan sesuai target. Faktor pendorong pada Dinas Sumber Daya Air yaitu di beberapa kegiatan sudah terlaksana sesuai dengan target rencana keuangan dan fisik dikarenakan perencanaan dan penganggaran yang tepat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Usulan Masyarakat

Adapun beberapa hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Instansi Kabupaten/Kota terkait yang langsung ditujukan kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dari hasil Forum Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Air dapat dilihat pada tabel 2.6.

Pada umumnya beberapa kegiatan yang merupakan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Instansi Kabupaten/Kota terkait sudah termasuk dalam usulan kegiatan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat TA. 2025 maupun usulan ke Pusat dalam hal ini adalah Balai Besar Wilayah Sungai. Kemudian untuk beberapa usulan dari Kabupaten/Kota perihal kegiatan-kegiatan yang menyangkut penanganan/rehabilitasi jaringan irigasi dapat menjadi CP/CL kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Pedesaan (BTL) yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah, bila proposal dan data Perencanaan Detailnya sudah masuk ke Dinas Sumber Daya Air dan dianalisis lebih lanjut oleh Bidang Perencanaan Teknik serta Bidang Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat untuk kemudian disetujui menjadi bagian dari hibah tersebut.W

Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya merupakan dukungan pembangunan Waduk atau Bendung yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sudah dimasukkan kedalam program kegiatan tahun 2025 Dinas Sumber Daya Air dalam bentuk Tim Samsat dukungan pembangunan Waduk Strategis yang bertugas mengawal jalannya pembebasan lahan dan pembangunan waduk, namun dikarenakan belum adanya MOU antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyetujui proporsi pembagian lahan yang menjadi tanggungan pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota agar pekerjaan pembangunan Waduk/Bendung tersebut dapat segera terlaksana.

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kepentingan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Jawa Barat

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kab/Kota : Kab. Bogor

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Ciliwung Katulampa Kecamatan Cibinong	Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong	Perbaikan saluran tersier BCK6 (saluran Cikerti)	Rp2,000,000,000.00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
			Perbaikan saluran tersier BCK9 (saluran Cilame dan saluran Cibinong Timur)	Rp2,000,000,000.00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
			Perbaikan bangunan sadap terjun BCK12	Rp1,500,000,000.00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
2	Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi D.I. Kranji Kecamatan Cibinong	Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong	Perbaikan saluran induk HM 20 - HM 21	Rp1,500,000,000.00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
			Normalisasi saluran induk HM 2 - HM 22	Rp600,000,000.00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
			Perbaikan Bendung HM 0	Rp500,000,000.00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
3	Setu Curug Mas Yono		Pengerukan sedimen di setu	Rp3,000,000,000.00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
4	Setu Cibeureum	Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojong Gede	Pengerukan sedimen di setu	Rp3,000,000,000.00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
			DED Pembuatan sodetan saluran	Rp600,000,000.00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab/Kota : Kota Bogor

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sal. Cisadane Empang	Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor	Pembangunan Tembok Penahan Tanah sepanjang 200 meter	Rp4.000.000.000,00	0,02	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sal. Kalibaru (Katulampa)	Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor	Pembangunan Tembok Penahan Tanah sepanjang 50 meter	Rp5.000.000.000,00	0,005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sal. Cibalok	Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor	Pembangunan Tembok Penahan Tanah sepanjang 50 meter	Rp4.000.000.000,00	0,005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Saluran Cidepit	Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor	Pembangunan Tembok Penahan Tanah sepanjang 50 meter	Rp2.000.000.000,00	0,005	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Pembangunan Tembok Penahan Tanah Saluran Cisadane Empang	Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor	Pembangunan Tembok Penahan Tanah sepanjang 20 meter	Rp1.000.000.000,00	0,002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab/Kota : Kota Depok

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penataan Kali Cabang Tengah Belakang Transmart Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok	Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok	Terciptanya Perkuatan Tebing dan Tanggul Sungai di Jaringan Sungai	Rp1.000.000.000,00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Penataan Kali Cabang Barat Perbatasan Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok	Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok	Terciptanya Perkuatan Tebing dan Tanggul Sungai di Jaringan Sungai	Rp1.000.000.000,00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Perbaikan Bendung Irigasi BCB 1 Kecamatan Cipayung Kota Depok	Kecamatan Cipayung Kota Depok	Terbangunnya Bendung Irigasi	Rp1.000.000.000,00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Perbaikan Bendung Irigasi BCB 2 Kecamatan Cipayung Kota Depok	Kecamatan Cipayung Kota Depok	Terbangunnya Bendung Irigasi	Rp1.000.000.000,00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Perbaikan Bendung Irigasi Caringin 2 Kecamatan Sawangan Kota Depok	Kecamatan Sawangan Kota Depok	Terbangunnya Bendung Irigasi	Rp1.000.000.000,00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
6	Pembangunan Drainase di Jalan Raya Provinsi Tole Iskandar Kota Depok	Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok	Penataan Drainase dan Pengendali Banjir	Rp10.563.000.000,00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
7	Pembangunan Drainase di Jalan Raya Provinsi Sawangan Kota Depok	Kecamatan Sawangan, Kota Depok	Penataan Drainase dan Pengendali Banjir	Rp5.563.000.000,00		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Dinas : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kab/Kota : Kota Bekasi

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Normalisasi dan Perbaikan Turap SS rawa baru	Kec. Bekasi Timur	Normalisasi dan Perbaikan Turap	Rp5.000.000.000,00	-	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
2	Normalisasi dan Perbaikan Turap SS bekasi pangkal	Kec. Medan Satria, Kec. Bekasi Utara	Normalisasi dan Perbaikan Turap	Rp15.000.000.000,00	-	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
3	Pembangunan Kolam Polder Perumahan kemang Pratama	Kec. Rawalumbu	Pembangunan Polder	Rp10.000.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
4	Lanjutan rehabilitasi saluran perumahan permata pekayon menuju Kali bekasi	kec Bekasi Selatan	Rehabilitasi Saluran	Rp10.000.000.000,00	-	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
5	Revitalisasi Saluran rw 04 menuju kali bekasi kel. Sepanjang Jaya	Kec. Rawalumbu	Rehabilitasi Saluran	Rp4.000.000.000,00	-	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
6	Lanjutan Pembangunan Drainase Saluran (Banjir) Kelurahan Duren Jaya	Kec. Bekasi Timur	Pembangunan Drainase	Rp6.000.000.000,00	-	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
7	Pembangunan Saluran Pangkalan Bambu Margajaya	Kel. Margajaya Kec. Bekasi Selatan	Pembangunan Drainase Jalan	Rp25.000.000.000,00	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
8	Pembangunan Saluran Jalan Rawa Mulya dari SDN 5 Mustikajaya s.d Kali Pete	Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Rp20.000.000.000,00	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
9	Lanjutan Pembangunan Bangunan Pelengkap dan Outlet Polder Jati Kramat	Kel. Jatikramat Kec. Jatiasih	Pembangunan Polder	Rp2.500.000.000,00	-	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

		Penanganan Banjir							
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman & Pertanahan

Kab/Kota : Kota Sukabumi

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Perkuatan Tebing Sungai Cisuda	Kelurahan Subangjaya, kelurahan Nanggaleng, kelurahan Jayaraksa, kelurahan Baros	Memperkuat tebing sungai mitigasi longsor dan kerusakan akibat daya dorong arus sungai, penyempurnaan sistem tanggul mitigasi banjir, memperlancar aliran air	Rp6.000.000.000,00	625	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2	Perkuatan Tebing Sungai Tonjong	Kelurahan Jayaraksa, kelurahan Sudajayahilir, kelurahan Jayamekar, kelurahan Cikundul	Memperkuat tebing sungai mitigasi longsor dan kerusakan akibat daya dorong arus sungai, penyempurnaan sistem tanggul mitigasi banjir, memperlancar aliran air	Rp6.000.000.000,00	84	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
3	Perkuatan Tebing Sungai Cipanengah	Kelurahan Tipar, kelurahan Sindangsari, kelurahan Cipanengah, kelurahan Cikundul	Memperkuat tebing sungai mitigasi longsor dan kerusakan akibat daya dorong arus sungai, penyempurnaan sistem tanggul mitigasi banjir,	Rp6.000.000.000,00	50,5	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		(Desa/Kel/Kec)								
			memperlancar aliran air							

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kab/Kota : Kab. Bandung

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		(Desa/Kel/Kec)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembangunan Kolam Retensi Cikasungka	Desa Panyirapan Kec. Soreang	Pembangunan Kolam Retensi	Rp10.000.000.000,00	1,38	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Pembangunan Kolam Retensi Cidawolong	Desa Biru Kec. Majalaya	Pembangunan Kolam Retensi	Rp7.000.000.000,00	0,92	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Rehabilitasi Irigasi Cigadog	Desa Lebakmuncang Kec. Ciwidey	Pembangunan Keermuur saluran	Rp200.000.000,00	627	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Rehabilitasi Irigasi Cilaki	Desa Sukamaju Kec. Cimaung	Pembangunan Keermuur saluran	Rp200.000.000,00	66	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Rehabilitasi Irigasi Cadasgantung	Desa Lamajang Kec. Pangalengan	Pembangunan Keermuur saluran	Rp200.000.000,00	125	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kab/Kota : Kab. Bandung Barat

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		(Desa/Kel/Kec)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		(Desa/Kel/Kec)								
1	Rehabilitasi Daerah Irigasi Saraya	Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor	Perbaikan Bendung, Perbaikan Bangunan Sadap, Perbaikan Saluran	Rp4.341.625.000,00	185	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
2	Rehabilitasi Daerah Irigasi Leuwigugur	Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta	Perbaikan Bendung, Perbaikan Bangunan Sadap, Perbaikan Bangunan Ukur, Perbaikan Saluran	Rp3.106.816.000,00	170	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
3	Pembangunan Talang Daerah Irigasi Cidap I	Desa Gununghalu, Kecamatan Gununghalu	Pembangunan Talang Irigasi	Rp15.616.440.000,00	941	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab/Kota : Kab. Cianjur

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		(Desa/Kel/Kec)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tegallega (Program Pelestarian Padi Lokal Pandanwangi) Kabupaten Cianjur	Desa Tegallega Kec. Warungkondang	Jaringan irigasi yang direhabilitasi bendung, sadap, penguras, saluran dan jalan inspeksi.	Rp2.632.012.000,00	84	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cisarandi (Program	Desa Sukakerta/Sukanagalih Kec. Cilaku	Jaringan irigasi yang direhabilitasi bendung, gorong-	Rp7.734.373.000,00	108	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
	Irigasi Tuntas) Kabupaten Cianjur		gorong, jembatan, terjunan, pelimpah/pembuang, oncoran/sadap, saluran tertutup, bangunan bagi/sadap dan saluran							
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikawung (Program Irigasi Tuntas) Kabupaten Cianjur	Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak.	Pasangan Saluran 6-7a, Overclesing, Bangunan Penguras, Bangunan Pengaman Talang, Bangunan sdap dan Bangunan Talang	Rp4.294.667.000,00	524	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Leuwi Sodong (Program Irigasi Tuntas) Kabupaten Cianjur	Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur	Pasangan Saluran, Bangunan Bendung, Bangunan Gorong gorong, Bangunan Talang, Jembatan Orang, Jembatan Desa Simpang, Terjunan, Pelimpah, Oncoran	Rp10.568.769.000,00	163	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kab/Kota : Kab. Indramayu

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	Pembangunan Longstorage Blok Urung-Urung	Desa Limbangan - Kecamatan Juntinyuat	1 Unit	Rp26.253.900.000,00	1,1	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
2	Pembangunan Embung Carik	Desa Jatisura - Kecamatan Cikedung	1 Unit	Rp17.817.600.000,00	1,3	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
3	Pembangunan Embung Jakadolog	Desa Pabeanudik - Kecamatan Indramayu	1 Unit	Rp4.553.024.000,00	0,8	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
4	Rehabilitasi Embung Telukagung	Desa Telukagung – Kecamatan Indramayu	1 Unit	Rp4.096.204.000,00	5000 m ³	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
5	Pembangunan tampungan Longstorage Wira I	Desa Panyindangan Wetan - Kec Sindang	1 Unit	Rp1.459.144.000,00	50.00 m ³	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
6	Rehabilitasi Embung Pandansari	Desa Tegu Kidul - Kecamatan Sliyeg	1 Unit	Rp3.277.493.000,00	1650 m ³	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
7	Pembangunan Longstorage Gabus	Desa Pondoh Kec Juntinyuat	1 Unit	Rp1.545.707.600,00	60.000 m ³	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
8	Rehabilitasi Longstorage Sukareja	Desa Tempel - Kec Lelea	1 Unit	Rp5.186.523.000,00	15.000 m ³	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
9	Pembangunan TPT Saluran Pembuang DI. Situbolang Desa Jatisura	Desa Jatisura - Kecamatan Cikedung	1 Unit	Rp3.837.770.000,00		Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
10	Pembangunan Embung Pulo	Desa Ujunggebang - Kecamatan Sukra	1 Unit	Rp27.893.400.000,00	3,1	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
11	Rehabilitasi Embung Koda	Desa Jayamulya - Kec Kroya	1 Unit	Rp5.925.520.000,00	1,2	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
12	Pembangunan Longstorage Cilalang	Desa Sukaslamet Kec Kroya	1 Unit	Rp5.457.076.000,00		Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
13	Rehabilitasi Longstorage Mangsetan	Desa Sumuradem - Kecamatan Sukra	1 Unit	Rp1.820.697.000,00		Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
14	Pembangunan Bangunan Pengaman Banjir Desa Ilir	Desa Ilir - Kecamatan Kandanghaur	1 Unit	Rp7.864.300.000,00		Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan

Kab/Kota : Kab. Purwakarta

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Cipedang	Desa Ciawi, Kecamatan Wanayasa	Panjang 1662 m', Lebar 1,00 m	Rp3.936.427.000,00	112,84	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
2	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Cisagu 4	Desa Cibodas, Kecamatan Sukatani	Panjang 2506 m', lebar 0,9 m	Rp4.550.467.000,00	46,54	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
3	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Cibulakan	Desa Babakan, Kecamatan Wanayasa	Panjang 490 m', lebar 1,0 m	Rp964.732.000,00	49,92	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
4	Peningkatan Saluran Irigasi D.I Cikembang	Desa Kembangkuning, Kecamatan Jatiluhur	Panjang 500 m', lebar 1,29 m	Rp1.097.538.000,00	24,9	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kab/Kota : Kab. Cirebon

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Sedong Kec. Sedong	Kec. Sedong	Panjang Pasangan, Lka = 316 m dan Lki = 316 m dengan tinggi pasangan 1 m	Rp850.000.000,00	59 Ha	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Rehabilitasi Bendung Jatipari Kec. Kaliwedi	Kec. Kaliwedi	1 Bendung beserta Panjang Pasangan Sayap, Lka = 61 m dan Lki = 61 m dengan tinggi pasangan 3 m	Rp1.033.500.000,00	400 Ha	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Canguang Kec. Babakan	Kec. Babakan	Panjang Pasangan, Lka = 410 m dan Lki = 285 m dengan tinggi pemasangan 1,2 m	Rp1.400.000.000,00	325 Ha	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Rehabilitasi Bendung Jatisawit Kec. Plered	Kec. Plered	1 Bendung beserta Panjang Pasangan Sayap, LKa= 50 m dengan tinggi pasangan 3 m	Rp545.000.000,00	518 Ha	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kab/Kota : Kab. Kuningan

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cijolang	Desa Tugumulya, Cantilan Kec. Darma, Selajambe	Perbaikan Bangunan : 1 Buah Saluran : 120 m	Rp350.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipedak	Desa Cikondang, Pakapasan Hilir, Tundagan, Pakapasan Girang Kec. Hantara	Perbaikan Bangunan : 1 Buah Saluran : 300 m	Rp450.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedungcalung	Desa Cikandang, Geresik, Lebaksiuh Kec. Luragung, Ciawigebang	Perbaikan Bangunan : 1 Buah Saluran : 900 m	Rp625.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
(Desa/Kel/Kec)										
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipikul	Desa Karangtawang, Lengkong, Citiusari, Kaduagung Kec. Kuningan, Garawangi, Sindangagung	Perbaiki Saluran : 700,50 m	Rp2.289.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilengkrang B	Desa Gandasoli, Susukan, Karangmangu, Dukuhlor, Cimaranten, Babakanmulya, Pajambon Kec. Kramatmulya, Cipicung, Jalaksana	Perbaiki Bangunan : 3 Buah Saluran : 1.430 m	Rp1.800.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Surakatiga	Kel. Winduhaji, Awirarangan, Desa Kaduagung, Sindangsari, Kertawangunan Kec. Kuningan, Sindangagung	Perbaiki Bangunan : 1 Buah Saluran : 489 m	Rp450.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciherang	Desa Babatan, Tinggar, Babakanmulya, Sagarahieng Kec. Kadugede, Cigugur, Darma	Perbaiki Saluran : 350,20 m	Rp525.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cikepel	Desa Kahiyangan, Pancalang, Pakembangan, Salakadomas Kec.	Perbaiki Bendung : 1 Buah Bangunan : 2 Buah Saluran : 1.187 m	Rp1.550.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		Pancalang, Mandirancan								
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Banyuhurip (Palangmulya 1/ Kalimati)	Desa Cimara Kec. Cibeureum	Perbaiki Bangunan : 1 Buah Saluran : 210 m	Rp300.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipager Udik	Desa Sukasari, Mandirancan, Cibuntu Kec. Mandirancan, Pasawahan	Perbaiki Bendung : 1 Buah Bangunan : 1 Buah Saluran : 895 m	Rp1.250.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ancaran	Desa Muncangela, Karoya, Babakanreuma, Dukuh Lor, Dukuh Dalem Kec. Cipicung, Sindangagung, Ciawigebang	Perbaiki Bangunan : 6 Buah Saluran : 935 m	Rp1.759.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cinangka II	Desa Garajati, Baok, Karang Baru, Dukuh Picung Kec. Ciwaru, Luragung	Perbaiki Bendung : 1 Buah Bangunan : 1 Buah Saluran : 950 m	Rp1.275.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Citaal	Desa Citundun, Kaduagung, Ciwaru, Sumberjaya Kec. Ciwaru	Perbaiki Bendung : 1 Buah Saluran : 370 m	Rp450.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bratakasian	Desa Cipancur, Kalimanggis Kulon, Kalimanggis Wetan, Cihideunggirang, Cihideunghilir, Cidahu Kec. Kalimanggis, Cidahu	Perbaiki Bendung : 1 Buah Bangunan : 3 Buah Saluran : 1.637 m	Rp2.200.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisande Hilir	Desa Bendungan, Geresik, Dukuh Dalem, Cikandang Kec. Lebakwangi, Ciawigebang, Luragung	Perbaikan Bangunan : 1 Buah Saluran : 500 m	Rp400.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisubang	Desa Mandapajaya, Tangkolo Kec. Cilebak, Subang	Perbaikan Bendung : 2 Buah Perbaikan Bangunan : 2 Buah Saluran : 600 m	Rp950.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cimonte	Desa Legokherang, Bangunjaya, Subang Kec. Cilebak, Subang	Perbaikan Bendung : 2 Buah Bangunan : 1 Buah Saluran : 1.485 m	Rp1.600.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkap	Desa Sadamantra, Padamenak Kec. Jalaksana	Perbaikan Saluran	Rp250.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisrigading	Desa Mekarsari, Kutaraja Kec. Maleber	Perbaikan Saluran : 190 m	Rp250.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Susukan II	Desa Tarikolot, Tajurbuntu Kec. Pancalang	Perbaikan Saluran : 267 m	Rp250.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
21	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cijangkelok	Desa Cianggir, Sindangjawa Kec. Cibingbin	Perbaikan Saluran : 430 m	Rp450.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
22	Pembangunan TPT Sungai Cijangkelok	Desa Cibingbin, Citenjo, Sukaharja Kec. Cibingbin	Pembangunan TPT	Rp650.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria			Lembar Verifikasi		
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
23	Pembangunan TPT Sungai Ciolok	Desa Panyosogan, Ciawilor, Cihideung Girang Kec. Luragung, Ciawigebang, Cidahu	Pembangunan TPT	Rp450.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
24	Pembangunan TPT Sungai Citaal	Desa Ciwaru, Karangbaru, Garajati, Baok Kec. Ciwaru	Pembangunan TPT	Rp1.000.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
25	Rehabilitasi Embung Lengkong	Desa Caracas Kec. Cilimus	Rehabilitasi Embung	Rp350.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
26	Rehabilitasi Embung Babatan	Desa Babatan Kec. Kadugede	Rehabilitasi Embung	Rp1.750.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
27	Rehabilitasi Situ Cipojok	Desa Sukasari Kec. Mandirancan	Rehabilitasi Situ	Rp5.000.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
28	Pembangunan Situ Hiang	Desa Haurkuning Kec. Nusaherang	Pembangunan Situ	Rp5.000.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
29	Pembangunan Embung Tanjungkerta	Desa Tanjungkerta Kec. Karangancana	Pembangunan Embung	Rp2.500.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
30	Pembangunan Embung Bangbara	Desa Pasiragung Kec. Hantara	Pembangunan Embung	Rp2.000.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
31	Pembangunan Embung Kertawinangun	Desa Kertawinangun Kec. Cidahu	Pembangunan Embung	Rp1.500.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
32	Pembangunan Embung Sawah Dalem	Desa Mekarjaya Kec. Pancalang	Pembangunan Embung	Rp500.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
33	Pembangunan Embung Cihirup	Desa Cihirup Kec. Ciawigebang	Pembangunan Embung	Rp5.000.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
34	Pembangunan Situ Cijambu	Desa Legok Kec. Cidahu	Pembangunan Situ	Rp1.500.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
35	Pembangunan Embung Guriang Manik	Desa Cidahu Kec. Pasawahan	Pembangunan Embung	Rp2.500.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
36	Pembangunan Embung Cibulan	Desa Cibulan Kec. Cidahu	Pembangunan Embung	Rp1.500.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
37	Pembangunan Embung Sudimampir	Desa Cikaso Kec. Kramatmulya	Pembangunan Embung	Rp350.000.000,00		Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kab/Kota : Kab. Majalengka

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sindangpano	Desa Buah Kapas Kec. Sindangwangi	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp650.000.000,00	54	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cilancang	Desa Cilancang Kec. Cikijing	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp600.000.000,00	92	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibuntu	Desa Cidulang Kec. Cikijing	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp500.000.000,00	33	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ciracak	Desa Babakan Manjeti Kec. Sukahaji	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp476.000.000,00	44	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Malam	Desa Bantarujeg Kec. Bantarujeg	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp434.000.000,00	47	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Babakan	Desa Tajur Kec. Cigasong	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp356.000.000,00	24	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cipanten	Desa Gunungkuning Kec. Sindang	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp420.000.000,00	33	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Citahi	Desa Waringin Kec. Palasah	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp800.000.000,00	78	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Janawi	Desa Payung Kec. Rajagaluh	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp756.000.000,00	9	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kembang	Desa Candrajaya Kec. Sukahaji	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp826.000.000,00	54	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Leuwigeuni	Desa Sukamukti Kec. Cikijing	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp588.000.000,00	38	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Limus Tilu	Desa Cisoka Kec. Cikijing	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp588.000.000,00	108	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Nursalim	Desa Buah Kapas Kec. Sindangwangi	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp926.000.000,00	37	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pajajar	Desa Pajajar Kec. Rajagaluh	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp550.000.000,00	39	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sawah Lega	Desa Padarek Kec. Lemahsugih	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp378.000.000,00	9	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Singawada	Desa Singawada Kec. Rajagaluh	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp700.000.000,00	32	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Talagaherang	Desa Jerukleueut Kec. Sindangwangi	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp952.000.000,00	67	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Blentuk	Desa Bongas Wetan Kec. Sumberjaya	Terpenuhinya Debit Air Ke Petak Tersier	Rp600.000.000,00	364	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab/Kota : Kab. Garut

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Leuwibitung (327 Ha)	Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi	Perbaikan Tembok Kirmir 915,50 M'	Rp800.000.000,00	52	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Citameng I (507 Ha)	Desa Cintamanik, Kecamatan Karangtengah	Perbaikan Tembok Kirmir 846,00 M'	Rp700.000.000,00	20,8	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Badama (555 Ha)	Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul	Perbaikan Tembok Kirmir 1.002,00 M'	Rp650.000.000,00	13,7	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Baranangsiang (882 Ha)	Desa Cintanagara, Kecamatan Cigedug	Perbaikan Saluran Pasangan 787,00 M'	Rp650.000.000,00	27	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cianten (586 Ha)	Desa Surabaya Kecamatan Selaawi	Perbaikan Tembok Kirmir 810,00 M'	Rp600.000.000,00	28,8	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cibedug (517 Ha)	Desa Limbangan Tengah, Kecamatan Limbangan	Perbaikan Saluran Pasangan 546,00 M'	Rp500.000.000,00	22	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cibuyutan Utara (463 Ha)	Desa Sindangsari, Kecamatan Leuwigoong	Perbaikan Tembok Kirmir 684,00 M'	Rp500.000.000,00	26,2	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cimanuk (874 Ha)	Desa Hegarmanah, Kecamatan Bayongbong	Perbaikan Tembok Kirmir 322,00 M'	Rp400.000.000,00	22,7	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sindujaya (560 Ha)	Desa Ciudian, Kecamatan Singajaya	Perbaikan Tembok Kirmir 460,00 M'	Rp400.000.000,00	20,1	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipacing (270 Ha)	Desa Sindangsuka, Kecamatan Cibatu	Perbaikan Tembok Kirmir 531,50 M'	Rp300.000.000,00	22	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cirompang (847 Ha)	Desa Bungbulang, Kecamatan Bungbulang	Perbaikan Tembok Kirmir 381,00 M'	Rp300.000.000,00	25	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipancar (520 Ha)	Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora	Perbaikan Tembok Kirmir 574,00 M'	Rp500.000.000,00	27,3	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ciroyom (762 Ha)	Desa Cintarasa, Kecamatan Samarang	Perbaikan Tembok Kirmir 256,50 M'	Rp300.000.000,00	18,5	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cisangkan (118 Ha)	Desa Sadang, Kecamatan Wanaraja	Perbaikan Tembok Kirmir 326,00 M'	Rp300.000.000,00	12,3	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Citameng II (341 Ha)	Desa Mekarluuy, Kecamatan Sukawening	Perbaikan Tembok Kirmir 349,00 M'	Rp300.000.000,00	24,5	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
(Desa/Kel/Kec)										
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Citikey (375 Ha)	Desa Cibiuk, Kecamatan Cibiuk	Perbaiki Saluran Pasangan 278,00 M'	Rp300.000.000,00	15,9	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Curug Ngebul (136 Ha)	Desa Neglasari, Kecamatan Cisompet	Perbaiki Tembok Kirmir 504,00 M'	Rp300.000.000,00	15	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kab/Kota : Kab. Ciamis

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
(Desa/Kel/Kec)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cijangkar I	Desa Jatinagara Kecamatan Jatinagara	219,3	Rp545.000.000,00	35,71	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cidangkareng	Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti	597	Rp420.000.000,00	28,57	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pakuwon	Desa Sadapaingan Kecamatan Panawangan	419	Rp1.055.000.000,00	27,75	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibenda	Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti	452	Rp420.000.000,00	28,57	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Dago	Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti	235,5	Rp320.000.000,00	21,43	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Argalaksana	Desa Sukamulya Kecamatan Cihaurbeuti	463	Rp320.000.000,00	21,43	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kalicandra	Desa Langkapsari Kecamatan Banjaranyar	400	Rp1.055.000.000,00	71,43	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Nanggela	Desa Cintanagara Kecamatan Jatinagara	108,00 m dan bendung 1 buah	Rp1.560.000.000,00	107,14	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		(Desa/Kel/Kec)								
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cipalih Nagawiru	Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis/Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing	288	Rp745.000.000,00	28,57	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cimuncang III	Desa Kertaharja Kecamatan Panumbangan	143	Rp220.000.000,00	14,29	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Depok	Desa Sukamjau Kecamatan Cihaurbeuti	225,75	Rp420.000.000,00	28,57	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Ciloa	Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti	207	Rp220.000.000,00	14,29	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Parakanpedang	Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan	257,6	Rp420.000.000,00	15	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kiwiri	Desa Indragiri, Gardujaya Kecamatan Panawangan	570,3	Rp545.000.000,00	35,71	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cibeurih	Desa Sukahurip Kecamatan Cisaga	98,00 m, bendung 1 buah	Rp1.560.000.000,00	71,25	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cianda	Desa Sukahaji Kecamatan Cihaurbeuti	345,00 m dan bendung 1 buah	Rp1.055.000.000,00	71,43	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bahara Kanan	Desa Maparah Kecamatan Panjalu	1231	Rp1.055.000.000,00	71,43	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Danasari Kanan	Desa Kertabumi/Karanganyar Kecamatan Cijeungjing	506	Rp745.000.000,00	50	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jagabaya	Desa Panawangan, Jagabaya Kecamatan Panawangan	861,4	Rp1.560.000.000,00	107,14	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
20	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cimamut BBI	Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg	618,60 m, bendung 1 buah	Rp1.055.000.000,00	14,29	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
(Desa/Kel/Kec)										
			dan bangunan air 1 buah							

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kab/Kota : Kota Banjar

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
(Desa/Kel/Kec)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Karangsari	Desa Batulawang Kecamatan Pataruman	452 m	Rp500,000,000.00	13.89	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Situleutik	Desa Cibeureum Kecamatan Banjar	850 m	Rp700,000,000.00	19.5	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Pagak	Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar	260.33 m	Rp500,000,000.00	18.1	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Cicalung	Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman	182.56 m	Rp500,000,000.00	10.01	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Cibodas	Desa Cibeureum Kecamatan Banjar	321.57 m	Rp700,000,000.00	17.88	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Jaringan Irigasi) Saluran Pembuang Ranca Muncang Cipariuk	Desa Neglasari Kecamatan Banjar	300 m	Rp700,000,000.00	9.78	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Jaringan Irigasi) Saluran Pembuang Rancabolang	Desa Neglasari Kecamatan Banjar	300 m	Rp700,000,000.00	18.15	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Pembangunan Tembok Penahan	Desa Binangun Kecamatan Pataruman	300 m	Rp700,000,000.00	0.09	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		(Desa/Kel/Kec)								
	Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama Mundu									
9	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase Utama Sogati	Desa Cibeureum Kecamatan Banjar	300m	Rp700,000,000.00	0.09	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Jaringan Irigasi) Saluran Pembuang Cicalung	Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman	129.97 m	Rp700,000,000.00	10.01	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Jaringan Irigasi) Saluran Pembuang Cibonte	Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar	300 m	Rp700,000,000.00	9.62	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Jaringan Irigasi) Saluran Pembuang Cikupa	Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar	300 m	Rp700,000,000.00	9.14	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (Jaringan Irigasi) Saluran Pembuang Rancabeusi-Sawah Balong	Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar	300 m	Rp700,000,000.00	5.86	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab/Kota : Kota Tasikmalaya

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		(Desa/Kel/Kec)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
(Desa/Kel/Kec)										
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikalang HM 0 - HM 10	Kecamatan Purbaratu	619,50	Rp528.814.000,00	0,13	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikalang HM 10 - HM 20	Kecamatan Cibeureum	678,00	Rp509.424.000,00	8,23	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikalang HM 20 - HM 30	Kecamatan Cibeureum	713,30	Rp1.076.442.000,00	17,30	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikalang HM 30 - HM 40	Kecamatan Cibeureum	1612,00	Rp2.961.246.000,00	23,64	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikalang HM 40 - HM 50	Kecamatan Cibeureum	473,40	Rp1.956.199.000,00	35,09	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikalang HM 50 - HM 60	Kecamatan Cibeureum	934,00	Rp1.110.905.000,00	47,14	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikalang HM 60 - HM 70	Kecamatan Cibeureum	1347,00	Rp1.939.605.000,00	55,80	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cikalang HM 70 - HM 78	Kecamatan Cibeureum	1224,50	Rp754.662.000,00	57,88	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cinangka Blok Bendung	Kecamatan Tamansari	1 Bendung 515,50	Rp847.410.000,00	74,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kab/Kota : Kab. Tasikmalaya

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
(Desa/Kel/Kec)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Leuwijoho Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Cibalanarik	Desa Cibalanarik Kec. Tanjungjaya	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	40	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciberuk Kab. Tasikmalaya, Tanjungjaya, Cikeusal	Desa Cikeusal Kec. Tanjungjaya	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	10	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
(Desa/Kel/Kec)										
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Darawayang Kab. Tasikmalaya, Cicalong, Panyiaran	Desa Panyiaran Kec. Cicalong	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 290 m	Rp450.000.000,00	75	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikayaraharja, Ciawi, Puteran Kab. Tasikmalaya	Desa Puteran Kec. Ciawi	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 323m	Rp500.000.000,00	925	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Legok Kab. Tasikmalaya, Cigalontang, Sukamanah	Desa Sukamanah Kec. Cigalontang	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 290 m	Rp450.000.000,00	80	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kalapanunggal, Cigalontang, Sukamanah Kab. Tasikmalaya	Desa Sukamanah Kec. Cigalontang	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	30	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cimanik, Taraju, Deudeul Kab. Tasikmalaya	Desa Deudeul Kec. Tawang	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 323m	Rp500.000.000,00	243	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Nur Muhammad Kab. Tasikmalaya, Pagerageung, Puteran	Desa Puteran Kec. Pagerageung	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 290 m	Rp450.000.000,00	60	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Joglo, Taraju, Cikubang Kab. Tasikmalaya	Desa Cikubang Kec. Taraju	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	17	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sabelen, Cigalontang, Tenjonagara Kab. Tasikmalaya	Desa Tenjonagara Kec.Cigalontang	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	30	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Ciseupan, Cigalontang, Tenjonagara Kab. Tasikmalaya	Desa Tenjonagara Kec.Cigalontang	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	20	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
(Desa/Kel/Kec)										
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cimanggu 2, Sukaratu, Indrajaya Kab. Tasikmalaya	Desa Indrajaya Kec. Sukaratu	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	30	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cikupang Kab. Tasikmalaya, Singaparna, Singasari	Desa Singasari Kec. Singaparna	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	17	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cibuka Kab. Tasikmalaya, Ciawi, Citamba	Desa Citamba Kec. Ciawi	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	38	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sal. Sabelen, Cigalontang, Tenjonagara Kab. Tasikmalaya	Desa Tenjonagara Kec. Tenjonagara	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	30	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Gunung Neundeut, Cisayong, Sukasukur Kab. Tasikmalaya	Desa Sukasukur Kec. Cisayong	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	20	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cidahu, Cisayong, Mekarwangi Kab. Tasikmalaya	Desa Cisayong Kec. Mekarwangi	Pembuatan talang duduk terbuka spj. 158 m	Rp300.000.000,00	45	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Dinas : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab/Kota : Kab. Pangandaran

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
(Desa/Kel/Kec)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		(Desa/Kel/Kec)								
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Proteksi Tebing Saluran Pembuang Kedung Gendis	Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp3.000.000.000,00	37,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Proteksi Tebing Saluran Pembuang Ciawitali Tengah	Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp3.000.000.000,00	35,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cihonje	Desa Pagerbumi Kecamatan Cigugur	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp500.000.000,00	16,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Pembuang Bunton	Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp3.000.000.000,00	10,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Proteksi Saluran Pembuang Ciloji D.I Ciloji (Lanjutan)	Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp2.000.000.000,00	37,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Pembuang Karang Tengah (Lanjutan)	Desa Maruyungsasi Kecamatan Padaherang	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp1.500.000.000,00	21,92	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Pembuang Batumalang (Lanjutan) D.I Batumalang	Desa Batumalang Kecamatan Cimerak	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp1.000.000.000,00	80,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cikebi	Desa Sukamulya Kecamatan Langkaplancar	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp1.500.000.000,00	67,20	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Guha Reregan (Lanjutan)	Desa Selasari Kecamatan Parigi	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp1.500.000.000,00	52,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Guha Lanang	Desa Selasari Kecamatan Parigi	Memperlancar Arus aliran sungai,	Rp1.000.000.000,00	53,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		(Desa/Kel/Kec)								
			Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir							
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gunung Tiga	Desa Cintaratu Kecamatan Parigi	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp1.500.000.000,00	117,99	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
12	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Selasari D.I Langkob	Desa Selasari Kecamatan Parigi	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp1.500.000.000,00	12,60	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
13	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanggul Kiri dan Pintu Klep Sungai Citonjong D.I Cijumleng	Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari	Rp3.000.000.000,00	40,99	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025				Readiness Criteria				Lembar Verifikasi	
	Kegiatan	Lokasi	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
		(Desa/Kel/Kec)								
			daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir							
14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Cijumleng D.I Cijumleng II	Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp1.000.000.000,00	19,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
15	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Poponcol D.I Cibeureum II (Lanjutan)	Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp1.500.000.000,00	511,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sayap Bendung dan Pelurusan Sungai Cikembulan D.I Cikembulan	Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan	Rp3.500.000.000,00	670,25	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

No.	Rencana Tahun 2025			Readiness Criteria				Lembar Verifikasi		
	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel/Kec)	Output Kegiatan	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif	Lahan (Ha)	Sertifikat	DED	Dokumen Lingkungan	Surat Pengantar	Proposal
			Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir							
17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Sub Sekunder Pajaten D.I Cikembulan (Lanjutan)	Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp1.000.000.000,00	42,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada
18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Proteksi Saluran Pembuang Citunggilis (Lanjutan) D.I Cipisitan	Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang	Memperlancar Arus aliran sungai, Mengatasi kerusakan tebing sungai dari daya rusak arus sungai dan Memperkuat tebing sungai dan Peninggian tanggul dari luapan banjir	Rp2.500.000.000,00	34,00	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SUMBER DAYA AIR

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional dan kebijakan Pemerintah Jawa Barat menjadi acuan bagi Dinas di Provinsi termasuk Dinas Sumber Daya Air. Kemampuan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan. Pemerintah Pusat memandang, bahwa kedua sumberdaya itu masih belum optimal kualitasnya sehingga sangat mempengaruhi kemampuan pengelolaan air dan pelayanan kepada masyarakat. Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air dikembangkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan reformasi kebijakan irigasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air bertujuan agar pengelola irigasi, petani pemakai air dan penerima manfaat irigasi lainnya, mampu efisien serta berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air ke depan harus menempatkan **Capacity Building** dalam tahapan strategis. *Capacity Building* merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan yang menitik beratkan pada kemampuan pemerintah agar adapat mewujudkan *good governance*, yang bercirikan memiliki kapasitas menjalankan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah antara lain:

1. Akuntabel dan transparan dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi dalam proses demokrasi;
3. Peduli terhadap kemiskinan dan pemerataan;
4. Memiliki komitmen terhadap ekonomi yang berorientasi pasar (*edralin,1997*).

Komponen-komponen yang harus dikembangkan dalam *Capacity Building* menurut *Eade (1997)* adalah :

1. Kapasitas Individu Aparat (dimensi manusia);
2. Kapasitas kelembagaan (dimensi teknologi);
3. Kapasitas modal yang diwujudkan dalam bentuk sumberdaya, sarana dan prasarana (dimensi fisik).

Capacity Buliding di Indonesia didesain untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan, mendorong partisipasi masyarakat, mendorong tumbuh kembangnya sektor swasta dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar.

Pembaharuan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air tertuang dalam Peraturan presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang disusun berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial, keberlanjutan ekologis dan efisiensi ekonomi. Kebijakan Nasional Sumber Daya Air mempunyai visi “**Sumber Daya Air Nasional yang dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan untuk Ketahanan Air yang berkeadilan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia**”, dalam mewujudkan visi tersebut Kebijakan Nasional Sumber Daya Air s.d Tahun 2030 melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara terus menerus;
2. Mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Mengendalikan dan mengurangi daya rusak air;
4. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Membangun jaringan sistem informasi sumber daya air nasional yang terpadu antarsektor dan antarwilayah.

Dalam rangka penyelerasan pembangunan di Provinsi Jawa Barat terdapat rencana 10 program dan kegiatan provinsi yang merupakan *Major Project* yang rencana didanai oleh APBN untuk mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025 yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1 Rencana Program dan Kegiatan Provinsi Strategis
untuk Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Volume	Satuan	Major Project	Kementerian
A Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
1	Pembangunan Waduk Cibeet, Kab. Bogor	1	Lokasi	PN: 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Major Project: Pengembangan Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi	PUPR
2	Pembangunan Waduk Cijurey, Kab. Karawang)	1	Lokasi	PN: 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Major Project: Pengembangan Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi	PUPR
3	Pengendalian Banjir Kawasan BIJB Kertajati, Kab. Majalengka	1	Lokasi	PN: 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim Major Project: Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu	PUPR

No	Program/Kegiatan	Volume	Satuan	Major Project	Kementerian
A	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				
4	Pembangunan Embung Rancahilir, Kab. Subang	75.000	m ³	PN: 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Major Project: Pengembangan Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi	PUPR
5	DI. Caringin, Kab. Sukabumi	1	Lokasi	PN: 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Major Project: 18 Waduk Multiguna	PUPR
6	DI. Parigi, Kab. Pangandaran	1	Lokasi	PN: 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Major Project: 18 Waduk Multiguna	PUPR
7	DI. Curugdendeng, Kab. Cianjur	1	Lokasi	PN: 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Major Project: 18 Waduk Multiguna	PUPR
8	DI. Candragoyang, Kab. Garut	1	Lokasi	PN: 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Major Project: 18 Waduk Multiguna	PUPR
9	DI. Cikalong, Kab. Tasikmalaya	1	Lokasi	PN: 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Major Project: 18 Waduk Multiguna	PUPR
10	Penanganan Banjir Melong	1	Lokasi	PN: 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim Major Project: Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu	PUPR

Untuk mendukung Kebijakan Nasional Dinas Sumber Daya Air berkontribusi dalam Pendampingan Pembangunan 7 Bendungan Strategis Nasional di Jawa Barat. Pendampingan tersebut merupakan Pendampingan Penanganan Aspek Sosiasl dan Legalitas Pembangunan 9 Bendungan Strategis Nasional di Jawa Baratn dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung ketahan air dan irigasi di Jawa Barat;
2. Mendukung program pemerintah pusat dalam ketahanan pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan;

3. Penyediaan air baku, pengendalian banjir dan ketahanan energi;
4. Proyek strategis nasional merupakan bagian dari pembangunan 65 bendungan baru.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Bendungan Matenggeng dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional. Uraian lengkap terkait 6 Bendungan Strategis Nasional di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. 2 Bendungan Strategis di Provinsi Jawa Barat

No.	Bendungan	Lokasi	Manfaat
1	Bendungan Ciawi (Cipayung)	Lokasi rencana Bendungan Ciawi (Cipayung) terletak dibagian Hulu Sungai Ciliwung di Desa Cipayung, Desa Gadog, dan Desa Sukakara, Kecamatan Megamendung, dan Desa Kopo, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, ± 0,4 km dari jalan raya puncak pass dan dapat dilalui dengan kendaraan roda 4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian banjir sungai ciliwung 2. Konservasi sumber daya air 3. Pengembangan pariwisata
2	Bendungan Sukamahi	Dibagian Hulu Sungai Cisukabirus di Desa Sukamahi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, ± 1,4 km dari jalan raya puncak pass dan dapat dilalui dengan kendaraan roda 4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian banjir sungai ciliwung 2. Konservasi sumber daya air 3. Pengembangan pariwisata
3	Bendungan Sadawarana	Lokasi rencana Bendungan Sadawarna terletak di Desa Sadawarna, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Bendungan Sadawarna terletak diperbatasan antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irigasi 2.500 Ha di Kabupaten Subang 2. Irigasi 2.000 Ha di Kabupaten Sumedang 3. Air baku di Kabupaten Subang 2,3 ltr/dtk 4. Air baku di Kabupaten Sumedang 0,18 ltr/dtk 5. Pemeliharaan sungai 3,5 m³/dtk
4	Bendungan Cipanas	Lokasi rencana Bendungan Cipanas terletak di Desa Cibuluh, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang dan Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan suplai irigai 9.243 Ha (Kabupateb Indramayu dan Kabupaten Sumedang) 2. Suplai air baku 850 ltr/dtk (Kabupaten Sumedang dan Bandara Kertajati) 3. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) 3,0 MW 4. Pengendalian banjir wilayah Pantura 83%
5	Bendungan Kuningan	Lokasi rencana Bendungan Kuningan pada sungai Cikaro, terletak di Desa Randusari, Kecamatan Cibeureum, Kabupaten Kuningan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irigasi 3.000 Ha 2. Pengendalian banjir 3. Air baku 300 ltr/dtk 4. Tenaga listrik 500 KW

No.	Bendungan	Lokasi	Manfaat
6	Bendungan Leuwikeris	Lokasi rencana Bendungan Leuwikeris pada Sungai Tanduy Hulu, terletak di Desa Ancol, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya dan Desa Handapherang, Kecamatan Cijeunging, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan air irigasi untuk areal sawah 11.216 Ha 2. Penyediaan air baku untuk Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis sebesar 845 ltr/dtk 3. Mereduksi banjir periode 25 tahunan dari 509,7 m³/dtk menjadi 450,02 m³/dtk (11,7 %) 4. Potensi pembangkit listrik tenaga air sebesar 2 x 10 MW 5. Pariwisata dan konservasi air tanah
7	Bendungan Matenggeng	Sumber air berasal dari Sungai Cijjolang, Desa Matenggeng, Kecamatan Dayeuh Luhur, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Desa Cibodas Kecamatan Tambaksari Kabupaten Banjar, Provinsi Jawa Barat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irigasi 20.000 Ha 2. Pengendalian banjir 3. Penyediaan air baku sebesar Rp. 2.886.424 m³/dtk 4. Tenaga Listrik 30 MW 5. Pariwisata dan konservasi air tanah
8.	Bendungan Cibeet	Bendungan Cibeet berada di wilayah Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekitar 70 km dari Kota Jakarta melalui jalur Cileungsi – Jonggol dan 135 km dari Kota Bandung.	<p>Manfaat Bendungan Cibeet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi banjir yang di hilir Sungai Citarum pada elevasi muka air waduk +75 m sebesar 66% Q25th = 300,33 m³/s 2. Manfaat air baku masyarakat dan industri sebesar 3,77 m³/s 3. Manfaat irigasi baru di hilir Bendungan Cibeet seluas 1.037 ha 4. Manfaat suplesi irigasi Tarum Barat mengairi seluas 5.000 ha 5. Pembangkit listrik sebesar 0,25 MW
9.	Bendungan Cijurey	Bendungan Cijurey terletak di Kecamatan Sukamakmur, Cariu, dan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sekitar 75 km dari Kota Jakarta melalui jalur Cileungsi – Jonggol dan 135 m dari Kota Bandung.	<p>Manfaat Bendungan Cijurey:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduksi banjir Q25th = 291,47 m³/s sebesar 59,33% 2. Manfaat air baku sebesar 0,71 m³/s 3. Manfaat irigasi dapat mengairi seluas 561 ha 4. Pembangkit listrik sebesar 2 x 0,5 MW

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sumber Daya Air

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyiapkan instrumen perencanaan yang memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas. Rancangan Akhir Rencana kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 bertujuan untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, yang disesuaikan dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat serta mengacu pada kebijakan Sumber daya air tingkat nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat serta RPJMD.

Dinas Sumber Daya Air masuk kedalam **Langkah ke 2** yaitu "Pembangunan jaringan irigasi serta pengembangan ekosistem pertanian organik, melalui konektivitas kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta pengairan areal pertanian tadah hujan dengan menggunakan pompa bertenaga surya" dengan Visi yaitu "Jabar Istimewa Lembur Diurus Kota Ditata" dan Misi yaitu "Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya". Adapun pada tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 Dinas Sumber Daya Air termasuk kedalam Tujuan 3 yaitu "Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur, Sarana dan Prasarana yang Berkualitas serta Lingkungan yang Berkelanjutan" dengan Sasaran 1 yaitu "Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan sekitar kawasan konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan" serta indikator sasaran tersebut adalah Ratio Gini.

Sasaran pada RPJMD Jabar Tahun 2025-2029 terdiri dari:

1. Meningkatnya Ketahanan Air, Energi, Pangan dan Bencana
2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Indikator sasaran pada RPJMD Jabar Tahun 2025-2029 terdiri dari:

1. Indeks Ketahanan Air (IKtA) dengan target Tahun 2025 sebesar 3,66 poin
2. Indeks Kualitas Infrastruktur (IKI) dengan target Tahun 2025 sebesar 61,15 poin

Adapun sasaran Renstra Dinas Sumber Daya Air Tahun 2025 yaitu :

1. Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik
2. Meningkatnya Kinerja Irigasi

3. Berkurangnya Banjir pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
4. Terlindunginya Pantai dari Abrasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

Indikator sasaran Renstra Dinas Sumber Daya Air Tahun 2025 yaitu :

1. Kapasitas Air Baku dengan target Tahun 2025 sebesar 105,28 m³/detik
2. Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) dengan target Tahun 2025 sebesar 58,53 poin
3. Persentase Penurunan Luas Genangan Banjir pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi dengan target Tahun 2025 sebesar 100%
4. Persentase Penurunan Panjang Garis Pantai yang terkena Abrasi pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi dengan target Tahun 2025 sebesar 100%

3.3. Program dan Kegiatan

Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dalam mengacu kepada rencana pencapaian pembangunan jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat serta Program Nawacita yakni mendorong penuntasan pembangunan Waduk Strategis Di Jawa Barat, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, perlindungan dan pengelolaan situ dan mata air baik di wilayah sungai kewenangan pusat atau provinsi, perlindungan dan pengelolaan mata air, serta meningkatkan pengadaan air baku bagi masyarakat.

Tugas Pokok Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa barat adalah merumuskan Kebijakan Operasional dan Melaksanakan Sebagian Kewenangan Desentralisasi Bidang Sumber Daya Air Provinsi serta Kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur. Sedangkan fungsi Dinas antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis operasional pengembangan pengelolaan Sumber Daya Air
2. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang sumber daya air yang meliputi : pembinaan program pengelolaan, pelaksanaan konservasi dan pelestarian, pembinaan teknik pengelolaan, pembinaan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan pemanfaatan sumber daya air
3. Fasilitasi pengelolaan dan sistem investasi perusahaan sumber daya air
4. Pemberian perizinan pemanfaatan air dan sumber air serta pelaksanaan pelayanan umum
5. Pembinaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
6. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sumber daya air
7. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan

Dalam rangka untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air, Tahun 2025 akan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh bidang dan UPTD di Lingkup Dinas Sumber Daya Air Jawa Barat. Berdasarkan telaahan terhadap program/kegiatan di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, serta memperhatikan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Renstra Dinas Sumber Daya Air Tahun 2025-2029, maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 3 program, 11 kegiatan dan 152 sub kegiatan yang bersumber dari dana APBD oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 dengan lokasi sebagian besar kegiatan berada di Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 585.263.016.766 seperti disajikan pada Tabel 3.1 untuk program kegiatan dari APBD. Dengan rincian kegiatan-kegiatan pada program tersebut antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
 - a. Pengelolaan Dinas Sumber Daya Air dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Provinsi

Tabel 3. 3 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1					Urusan Wajib							
1	03				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				482.823.016.766		585.263.016.766	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01			Rogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (SDA)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (88,55)	77.399.755.513	A (88,55)	114.749.424.448	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
						Nilai Indeks Reformasi Birokrasi		B (69,92)		B (69,92)		
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Dok	1.713.621.066	1 Dok	788.885.430	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Dok	912.613.038	1 Dok	516.414.502	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	2 Dok	260.000.000	2 Dok	91.107.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	2 Dok	150.000.000	2 Dok	51.916.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	2 Dok	120.000.000	2 Dok	51.385.020	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana				
				Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD										
1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	3 Lap	121.008.028	3 Lap	36.302.408	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	3 Lap	150.000.000	3 Lap	41.760.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Dok	62.662.630.798	1 Dok	62.662.630.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	294 Orang/ Bulan	62.364.230.798	294 Orang/ Bulan	62.364.230.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	-	-	1 Dok	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Lap	100.000.000	1 Lap	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Dok	100.000.000	1 Dok	98.400.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Lap	98.400.000	1 Lap	62.662.630.798	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Akuntabel	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Dok	164.326.000	1 Dok	164.326.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	294 Orang	164.326.000	294 Orang	164.326.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Dok	2.335.699.074	1 Dok	1.128.390.393	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	4 Paket	145.057.600	4 Paket	145.057.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	12 Paket	554.586.674	12 Paket	450.726.243	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	5 Paket	236.200.000	5 Paket	70.860.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Penggandaan yang Disediakan						
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Lap	1.399.854.800	1 Lap	461.746.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Dok	999.555.484	1 Dok	39.971.275.736	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	-	-	1 Unit	39.077.412.360	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	10 Unit	999.555.484	10 Unit	893.863.376	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Dok	7.930.780.491	1 Dok	7.790.773.491	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Lap	20.000.000	1 Lap	20.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	3 Lap	759.250.000	3 Lap	619.243.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	3 Lap	7.151.530.491	3 Lap	7.151.530.491	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Dok	1.593.142.600	1 Dok	2.243.142.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	-	-	63 Unit	767.461.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	63 Unit	767.461.200	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	10 Unit	295.681.400	10 Unit	295.681.400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Unit	530.000.000	1 Unit	1.180.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Situ yang Terpelihara	Kota Bandung, Semua Kecamatan,	11,67 %	19.005.291.575	11,67 %	37.726.936.340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
					Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang		100 %	100 %				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Dilayani oleh Jaringan Irigasi	Semua Kelurahan					
						Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi		50,71 %		50,71 %		
1	03	01	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Sungai yang Dikelola dan Didukung oleh Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 WS	15.535.035.801	6 WS	32.520.179.038	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Lembaga	985.049.323	1 Lembaga	495.041.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Dok	1.850.000.000	100 Dok	1.164.350.174	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Lembaga	2.050.000.000	2 Lembaga	754.666.772	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dok	600.000.000	1 Dok	945.615.319	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 km	7.000.000.000	2 km	24.387.207.504	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 Dok	3.049.986.478	13 Dok	4.773.297.469	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Irigasi yang Dikelola	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103 Sistem Irigasi	3.470.255.774	103 Sistem Irigasi	5.206.757.302	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.573,5 km	725.562.112	1.573,5 km	237.060.373	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Dok	2.112.460.000	20 Dok	4.225.328.977	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99 Lembaga	632.233.662	99 Lembaga	744.367.952	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	11			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	100 %	1.869.710.263	100 %	723.667.904	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang Menerapkan Ketentuan Standar Tata Kelola Konstruksi	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	100 %	865.161.607	100 %	416.480.580	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	30 Orang	250.000.000	30 Orang	75.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	18 Lembaga	315.161.607	18 Lembaga	196.932.098	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	1 Dok	300.000.000	1 Dok	144.548.482	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Kualifikasi Ahli yang Disediakan						
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Pengelolaan Jasa Konstruksi yang Memanfaatkan Aplikasi	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	100%	1.004.548.656	100%	307.187.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Kota Bandung, Sumur Bandung, Braga	6 Dok	1.004.548.656	6 Dok	307.187.324	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Ciliwung-Cisadane)	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	B	2.985.979.672	B	3.455.727.648	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	1 Dok	515.817.467	1 Dok	285.565.444	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	1 Paket	34.347.944	1 Paket	25.950.450	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	1 Paket	160.811.556	1 Paket	143.560.105	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	1 Paket	28.367.855	1 Paket	28.367.855	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	1 Paket	15.000.000	1 Paket	4.500.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paedang	1 Lap	277.290.112	1 Lap	83.187.034	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paedang	1 Dok	83.250.000	1 Dok	83.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paedang	5 Unit	83.250.000	5 Unit	83.250.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paedang	1 Dok	1.673.369.314	1 Dok	1.673.369.314	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paedang	1 Lap	232.480.000	1 Lap	232.480.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paedang	1 Lap	51.410.000	1 Lap	51.410.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paedang	1 Lap	1.389.479.313	1 Lap	1.389.479.313	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paedang	1 Dok	713.542.891	1 Dok	1.413.542.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	5 Unit	213.542.891	5 Unit	413.542.891	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	1 Unit	500.000.000	1 Unit	1.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Ciliwung-Cisadane)	Persentase Situ yang Terpelihara	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	29,37 %	19.292.455.853	29,37 %	110.788.525.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
						Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi		48,96 %		48,96 %		
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Sungai yang Dikelola dan Didukung oleh Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	1 WS	6.078.331.654	1 WS	110.788.525.608	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	1 Unit	641.666.667	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Luas Lahan yang Dibebaskan untuk Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	26,32 ha	100.000.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hidrologi yang Disediakan dan Dokumen NPA yang Diidentifikasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	1 Dok	1.678.363.284	1 Dok	1.480.516.281	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	40 Unit *(Situ)	4.399.968.370	40 Unit *(Situ)	8.666.342.660	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Irigasi yang Dikelola	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	10 Daerah Irigasi	13.214.124.199	10 Daerah Irigasi	26.927.961.405	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	1,54 km	5.094.706.250	1,54 km	18.969.430.605	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	171,53 km	8.119.417.949	171,53 km	7.958.530.800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Cisadea-Cibareno)	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD PSDA WS. Cisadea-Cibareno	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	B	4.112.532.344	B	4.006.268.115	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	1 Dok	974.929.619	1 Dok	468.960.775	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	1 Paket	34.946.249	1 Paket	31.234.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	1 Paket	178.273.540	1 Paket	169.250.180	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
				Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan						
1	03 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	1 Paket	51.893.350	1 Paket	15.568.005	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	12 Lap	709.816.480	12 Lap	252.908.040	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	1 Dok	571.359.001	1 Dok	394.024.116	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	10 Unit	571.359.001	10 Unit	394.024.116	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	1 Dok	1.284.258.583	1 Dok	1.275.578.583	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	1 Lap	121.533.286	1 Lap	121.533.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	1 Lap	86.540.000	1 Lap	86.540.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	1 Lap	1.076.185.297	1 Lap	1.067.505.297	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	1 Dok	1.281.985.141	1 Dok	1.867.704.641	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	21 Unit	200.059.275	21 Unit	200.059.275	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	6 Unit	1.081.925.866	6 Unit	1.667.645.366	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Cisadea-Cibareno)	Persentase Situ yang Terpelihara	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	8,06 %	34.766.107.366	8,06 %	50.000.632.774	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
					Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi		44,33 %	44,33 %				
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Sungai yang Dikelola dan Didukung oleh Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	1 WS	20.717.116.115	1 WS	27.137.652.331	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	-	-	1	641.666.666	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	2 km	15.364.638.208	2 km	19.846.492.303	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hidrologi yang disediakan dan Dokumen NPA yang Diidentifikasi	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	34 Dok	1.686.608.089	34 Dok	1.592.664.284	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dikelola dan Dipelihara	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	12 Unit (Situ, Embung)	3.665.869.818	12 Unit (Situ, Embung)	5.056.829.078	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Irigasi yang Dikelola	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	13 Daerah Irigasi	14.048.991.251	13 Daerah Irigasi	22.862.980.443	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	0,129 km	2.607.722.888	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	-	-	2	11.077.380.343	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Sukabumi, Cikole, Selabatu	285,63 km	11.441.268.363	285,63 km	11.785.600.100	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Citarum)	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD PSDA WS. Citarum	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	B	5.444.077.967	B	5.086.541.709	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	1 Dok	727.415.037	1 Dok	361.407.499	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	12 Paket	30.402.004	12 Paket	30.402.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	5 Paket	103.827.872	5 Paket	87.766.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	5 Paket	69.036.081	5 Paket	69.036.081	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	12 Paket	38.231.580	12 Paket	14.706.064	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	12 Lap	485.917.500	12 Lap	159.496.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	1 Dok	913.866.456		752.827.217	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	20 Unit	913.866.456	20 Unit	752.827.217	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	1 Dok	3.119.470.616	1 Dok	3.088.981.135	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	12 Lap	310.337.339	12 Lap	310.337.338	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	12 Lap	125.474.505	12 Lap	125.474.505	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	12 Lap	2.683.658.772	12 Lap	2.653.169.292	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	1 Dok	683.325.858	1 Dok	883.325.858	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	29 Unit	136.550.000	29 Unit	336.550.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	8 Unit	546.775.858	8 Unit	546.775.858	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Citarum)	Persentase Situ yang Terpelihara	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	11,67 %	49.990.554.406	11,67 %	63.725.115.914	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
						Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi		43,60 %		43,60 %		
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Sungai yang Dikelola dan Didukung oleh Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	1 WS	25.304.081.737	1 WS	30.012.618.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	-	-	1 Unit	641.666.667	
1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	-	-	1 Unit	4.491.229.343	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hidrologi yang disediakan dan Dokumen NPA yang Diidentifikasi	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	4 Dok	988.403.746	4 Dok	786.539.007	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dikelola dan Dipelihara	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	11 Unit (Situ)	3.906.732.000	11 Unit (Situ)	3.776.623.226	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0123	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	1 Unit	20.408.945.991	1 Unit	15.546.560.617	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Irigasi yang Dikelola	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	40 Daerah Irigasi	24.686.472.669	40 Daerah Irigasi	33.712.497.054	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	1,736 km	3.299.843.750	1,736 km	12.585.517.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Bandung, Gedebage, Cisaranten Kidul	453,18 km	21.386.628.919	453,18 km	21.126.979.894	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Cimanuk-Cisanggarung)	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD PSDA WS. Cimanuk-Cisanggarung	Kab. Cirebon, Talun, Kepongongan	B	5.041.496.454	B	4.714.258.168	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Kab. Cirebon, Talun, Kepongongan	1 Dok	1.104.136.444	1 Dok	593.910.688	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Cirebon, Talun, Kepongongan	1 Paket	70.035.501	1 Paket	70.035.501	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Cirebon, Talun, Kepongongan	1 Paket	235.154.048	1 Paket	176.857.004	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	1 Paket	135.994.763	1 Paket	135.994.763	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	1 Paket	66.012.500	1 Paket	23.079.459	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	12 Lap	596.939.869	12 Lap	187.943.961	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	1 Dok	368.288.486	1 Dok	301.275.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor, Bogor Tengah, Paledang	5 Unit	368.288.486	5 Unit	301.275.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	1 Dok	2.457.498.323	1 Dok	2.457.498.323	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	4 Lap	422.932.877	4 Lap	422.932.877	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	1 Lap	94.560.000	1 Lap	94.560.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Cirebon, Talun, Kepongongan	1 Lap	1.940.005.445,62	1 Lap	1.940.005.446	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Cirebon, Talun, Kepongongan	1 Dok	1.111.573.202	1 Dok	1.361.573.202	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Cirebon, Talun, Kepongongan	-	-	-	562.840.391	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Cirebon, Talun, Kepongongan	35 Unit	312.840.391	-	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Cirebon, Talun, Kepongongan	1 Unit	798.732.810,53	1 Unit	798.732.811	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Cimanuk-Cisanggarung)	Persentase Situ yang Terpelihara	Kab. Cirebon, Talun, Kepongongan	4,24 %	28.176.266.257	4,24 %	53.104.634.466	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi		48,89 %		48,89 %				
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Sungai yang Dikelola dan Didukung oleh Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Kab. Cirebon, Talun, Kepongongan	1 WS	5.132.717.075	1 WS	11.857.167.942	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	02	1.01	0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	-	-	1 Unit	661.666.667	
1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	-	-	1 Unit	6.465.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hidrologi yang Disediakan dan Dokumen NPA yang Diidentifikasi	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	2 Dok	1.432.662.038	2 Dok	1.126.435.138	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Air Lainnya yang Dikelola dan Dipelihara	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	12 Unit (Situ, Waaduk)	3.700.055.037	12 Unit (Situ, Waaduk)	3.604.066.137	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Irigasi yang Dikelola	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	27 Daerah Irigasi	23.043.549.182	27 Daerah Irigasi	41.247.466.524	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	-	-	2 km	18.604.374.357	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Cirebon, Talun, Kepongpongan	375,90 km	23.043.549.182	375,90 km	22.643.092.167	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Citanduy)	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD PSDA WS. Citanduy	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	B	3.653.031.119	B	45.380.096.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1 Dok	897.113.707	1 Dok	355.942.393	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1 Paket	28.243.794	1 Paket	28.243.795	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1 Paket	60.313.871	1 Paket	55.433.257	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1 Paket	42.426.468	1 Paket	42.426.468	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1 Paket	160.559.058	1 Paket	48.167.718	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1 Lap	605.570.516	1 Lap	181.671.155	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Tawang,	1 Dok	369.611.545	1 Dok	261.543.764	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
							Semua Kelurahan					
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1 Unit	369.611.545	1 Unit	261.543.764	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1 Dok	1.556.322.876	1 Dok	1.556.322.876	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	4 Lap	162.530.824	4 Lap	162.530.824	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	2 Lap	144.959.000	2 Lap	144.959.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	5 Lap	1.248.833.052	5 Lap	1.248.833.052	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1 Dok	829.982.991	1 Dok	1.029.982.991	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	5 Unit	329.982.991	5 Unit	529.982.991	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Citanduy)	Persentase Situ yang Terpelihara	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	11,90 %	29.379.293.802		42.176.304.926	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi		58,64 %						
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Sungai yang Dikelola dan Didukung oleh Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1 WS	5.623.770.217	1 WS	11.657.360.574	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	-	-	1 Unit	641.666.667	
1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	-	-	1 Unit	5.500.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hidrologi yang Disediakan dan	Kota Tasikmalaya,	1 Dok	1.033.980.810	1 Dok	975.042.696	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
						Dokumen NPA yang Diidentifikasi	Tawang, Semua Kelurahan					
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dikelola dan Dipelihara	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	6 Unit (Situ)	4.589.789.407	6 Unit (Situ)	4.540.651.211	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Irigasi yang Dikelola	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	10 Daerah Irigasi	23.755.523.585	10 Daerah Irigasi	30.518.944.352	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	1,55 Km	12.821.173.553	1,55 Km	18.835.949.881	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Tasikmalaya, Tawang, Semua Kelurahan	110,37 km	10.934.350.032	110,37 km	11.682.994.471	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Ciwulan-Cilaki)	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD PSDA WS. Ciliwung-Cisadane	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	B	7.135.360.998	B	7.398.604.243	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	1 Dok	904.207.249	1 Dok	543.191.395	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	1 Paket	189.124.844	1 Paket	115.306.777	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	1 Paket	120.782.925	1 Paket	36.234.878	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	12 Lap	444.299.480	12 Lap	241.649.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	1 Dok	895.782.716	1 Dok	695.041.815	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	1 Paket	125.724.061	1 Paket	37.717.218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	10 Unit	770.058.655	10 Unit	657.324.597	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	1 Dok	1.633.308.533	1 Dok	1.633.308.533	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	12 Lap	170.685.997	12 Lap	170.685.997	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	12 Lap	156.210.978	12 Lap	156.210.978	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	12 Lap	1.306.411.558	12 Lap	1.306.411.558	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	1 Dok	3.702.062.500	1 Dok	4.527.062.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	15 Unit	302.062.500	15 Unit	502.062.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	4 Unit	3.400.000.000	4 Unit	4.025.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Ciwulan-Cilaki)	Persentase Situ yang Terpelihara	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	15,79 %	48.674.213.479	15,79 %	57.474.621.074	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
						Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi		60,53 %		60,53 %		
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Sungai yang Dikelola dan Didukung oleh Infrastruktur SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	1 WS	8.273.637.820	1 WS	23.101.252.975	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	-	-	-	641.666.667	
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	5 km	900.000.000	5 km	7.129.494.200	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hidrologi yang Disediakan dan Dokumen NPA yang Diidentifikasi	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	2 Dok	1.738.000.000	2 Dok	1.435.995.083	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Situ-Situ yang Dikelola dan Dipelihara	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	9 Unit (Situ)	5.635.637.820	9 Unit (Situ)	13.894.097.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha	Jumlah Sistem Irigasi yang Dikelola	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	6 Daerah Irigasi	40.400.575.659	6 Daerah Irigasi	34.373.368.099	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	APBD Murni Tahun 2025		APBD Perubahan Tahun 2025		Sumber Dana
								Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	7,85 km	22.198.322.453	7,85 km	16.277.056.002	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Tasikmalaya, Kawalu, Kersamenak	176,88 km	18.202.253.206	176,88 km	18.096.312.097	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB IV

PENUTUP

Ranhir Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Sumber Daya Air di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Ranhir Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air Tahun 2025 antara lain:

- a. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Ranhir Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. Penyusunan Ranhir Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Sumber Daya Air Tahun 2024-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Sumber Daya Air;
- c. Penyusunan Ranhir Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air ini juga berpedoman pada RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Ranhir Perubahan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Ranhir Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;

b. Dalam penyusunan RDPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Begitu pula dalam penyusunan DPPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Provinsi Jawa Barat.

3. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Ranhir Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Ranhir Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 pada triwulan satu dan triwulan dua tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Ranhir Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Ranhir Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh aparat Dinas Sumber Daya Air, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Dengan disusunnya Ranhir Perubahan Renja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Ranhir Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.